



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERHITUNGAN BIAYA SATUAN PROGRAM
SKPD DINAS PENDIDIKAN LAMONGAN TAHUN 2010**

TESIS

SYAWALUDIN

0806480864

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK**

JAKARTA

JULI 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERHITUNGAN BIAYA SATUAN PROGRAM
SKPD DINAS PENDIDIKAN LAMONGAN TAHUN 2010**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar:
MAGISTER EKONOMI (M.E.)**

SYAWALUDIN

0806480864

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
KEKHUSUSAN EKONOMI KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH**

JAKARTA

JULI 2012

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

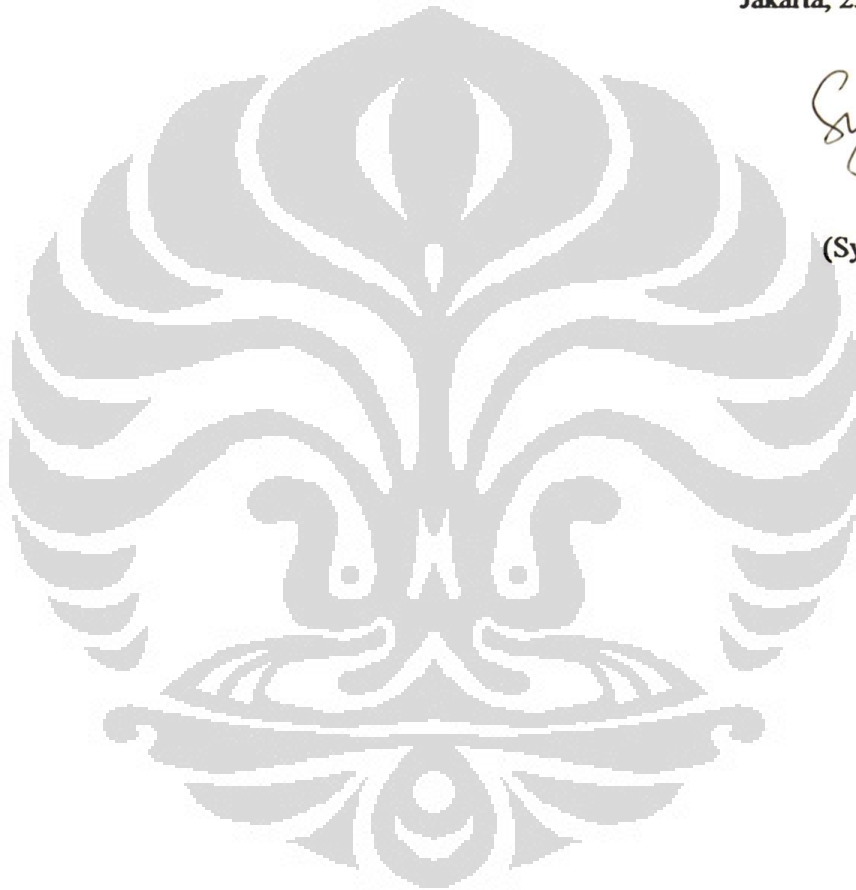
Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta, 25 Juli 2012



(Syawaludin)



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Syawaludin

NPM : 0806480864

Tanda Tangan :



Tanggal : Juli 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan Tesis ini. Penulisan Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ekonomi Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan Tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Bapak Iman Rozani, SE. MSi. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Bapak Andi Fahmi sebagai pembimbing akademik yang memudahkan penyusunan tesis ini
- (3) Ketua Program, Dosen & Staf Sekretariat MPKP FEUI atas bantuan dan kerja samanya selama penulis kuliah di Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
- (4) Bapak H. Deddi Noordiawan, SE., Ak., MM., dan keluarga, selaku dosen dan senior di Departemen Akuntansi FEI atas ilmu, nasihat dan saran yang diberikan selama penyusunan tesis ini
- (5) Bapak Ach. Bakir Al Afif Haq sebagai Kasubdit Wilayah I Direktorat Anggaran Daerah Direktorat Jenderal yang telah bersedia menjadi narasumber selaku salah seorang Tim Perumus Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
- (6) pihak PT. Medina Multi Mitra yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;

- (7) Rekan-rekan di MPKP FEUI Angkatan XIX pagi dan angkatan yang lain, terima kasih atas kebersamaan serta bantuannya
- (8) orang tua, Mama dan Almarhum Ayah, dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan
- (9) sahabat di FReS-TA, Raja TryOut dan FELUNI yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.
- (10) Semua pihak-pihak yang tidak dapat saya tulis satu persatu yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, Juli 2012

Syawaludin

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syawaludin

NPM : 0806480864

Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik

Departemen : Ilmu Ekonomi

Fakultas : Ekonomi

Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

EVALUASI STRUKTUR DAN KLASIFIKASI BELANJA PADA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO.13 TAHUN 2006 STUDI KASUS SKPD DINAS PENDIDIKAN LAMONGAN TAHUN 2010

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : Juli 2012

Yang menyatakan



(Syawaludin)

ABSTRAK

Nama : Syawaludin

Program Studi : Magister Perencanaan & Kebijakan Publik

Judul : EVALUASI STRUKTUR DAN KLASIFIKASI BELANJA PADA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO.13 TAHUN 2006
STUDI KASUS SKPD DINAS PENDIDIKAN LAMONGAN
TAHUN 2010

Tesis ini mengevaluasi struktur dan klasifikasi belanja pemerintah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 dengan membandingkannya dengan prinsip-prinsip dan klasifikasi pada akuntansi manajemen. Analisis terhadap belanja pemerintah ini untuk melihat apakah klasifikasi yang ada, mampu memberikan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan pemerintah daerah. Studi lapangan dilakukan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan. Penelitian menunjukkan bahwa struktur dan klasifikasi pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tidak dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Informasi yang dihasilkan tidak dapat langsung dijadikan sebagai standar biaya dan dapat menimbulkan *misleading* pembaca laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menyarankan perubahan dan penyesuaian pada struktur dan klasifikasi belanja Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006.

Kata kunci:

Struktur, Klasifikasi, Belanja, Biaya

ABSTRACT

Name : Syawaludin

Study Program: Master of Planning & Public Policy

Title : CALCULATION UNIT COST PROGRAM SERVICES
SKPD LAMONGAN EDUCATION OFFICIAL IN 2010

The Focus of this study is to calculate unit cost program services that provided by and on budget execution document of SKPD Lamongan Education Official in 2010. Calculation of this government spending is to know how much government spending according to their achievement target government institution. The Calculation is needed related to performance budget and can give information needed on making decisions to stake holder that uses of this government financial statement. Unit Cost will become on of measuring instrument to evaluate effectiveness, efisiensi and economical of using cost within the activity. This analysis needed skill and knowledge cost accounting carefully. Raw data from document cannot easily used directly to analyze. Classification government spending which is now applicable is not proper to make desired report so it must be to re classify. The Result of this study show that government spending related to target achievement is bigger than government spending unrelated to target achievement. The Researcher suggest to change and adjust structure and classification government spending on regulation of interior's ministry no. 13 year 2006.

Kata kunci:

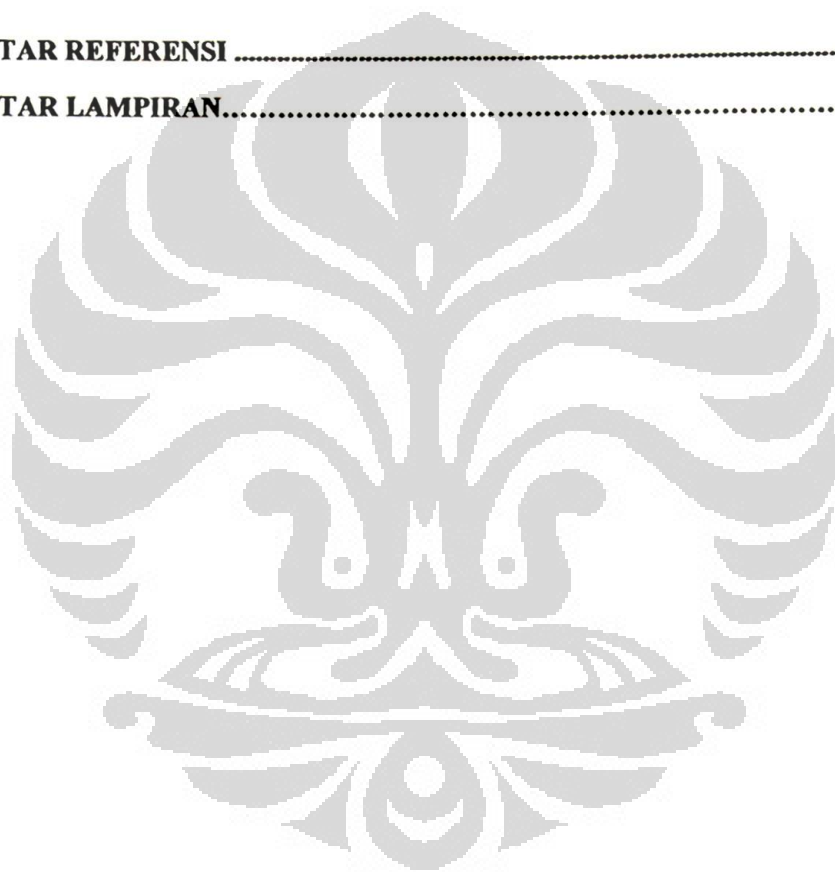
Calculation, Unit Cost, Spending.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Hipotesis	5
1.5 Metodologi Penelitian	6
1.6 Sistematika Penulisan	7
2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Anggaran	8
2.1.1 Definisi dan Konsep.....	8

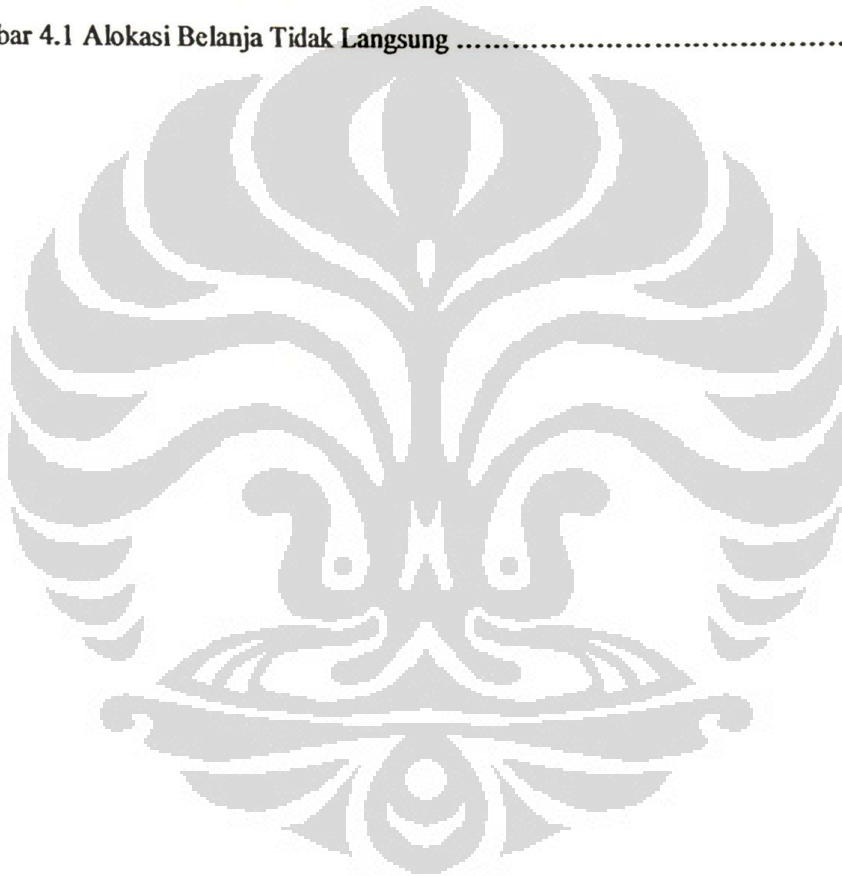
2.1.2	Anggaran Berbasis Kinerja.....	9
2.2	Belanja.....	12
2.2.1	Belanja Tidak Langsung.....	13
2.2.2	Belanja Langsung	14
2.3	Biaya	15
2.3.1	Klasifikasi dan Struktur Biaya.....	16
2.3.2	Perhitungan Biaya per Unit (Unit Cost)	18
2.3.3	Alokasi Biaya (<i>Cost Allocation</i>)	19
2.4	Mekanisme Penghitungan Unit <i>Cost</i> dalam Sektor Publik.....	21
2.4.1	Menentukan Unit.....	27
2.4.2	Menentukan Klasifikasi dan Menghitung Biaya.....	27
2.4.3	Menentukan Unit Cost.....	25
2.7	Penelitian Sebelumnya.....	29
3.	OBJEK PENELITIAN	31
3.1	Latar Belakang.....	31
3.2	Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.....	32
3.3	Visi dan Misi.....	35
3.4	Tujuan, Sasaran dan Kebijakan	37
3.5	Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2010.....	39
4.	ANALISIS BIAYA SATUAN LAYANAN.....	42
4.1	Menentukan Target Capaian Kinerja SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.....	42
4.2	Melakukan Reklasifikasi Belanja Program dan Kegiatan	43
4.3	Alokasi Belanja Tidak Langsung ke Belanja Langsung.....	50
4.3.1	Alokasi Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	52

4.3.2 Alokasi Program Pengembangan Budaya Baca dan Minat Perpustakaan	52
4.3.2 Alokasi Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.....	53
4.3 Belanja Tidak Terkait Capaian Kinerja.....	54
5. KESIMPULAN DAN SARAN	55
5.1 Kesimpulan.....	55
5.2 Saran.....	56
DAFTAR REFERENSI	57
DAFTAR LAMPIRAN.....	58



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Contoh Alokasi Biaya Metode <i>Direct Method</i>	25
Gambar 2.2 Contoh Alokasi Biaya Metode <i>Sequential</i> atau <i>Step Down Method</i> ...	26
Gambar 2.3. Contoh Alokasi Biaya Metode <i>Reciprocal</i> atau <i>Algebra Method</i>	26
Gambar 2.4 Alokasi Unit Cost	28
Gambar 4.1 Alokasi Belanja Tidak Langsung	51



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Ringkasan APBD PEMDA Lamongan 2010 Urusan Pendidikan.....	4
Tabel 2.1. Perhitungan Biaya per Unit (<i>Unit Cost</i>).....	18
Tabel 2.2 Departemen Produksi dan Departemen Penunjang.....	19
Tabel 2.3 Data Awal Perusahaan XYZ.....	22
Tabel 3.1. Data Pejabat Struktural dan Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2010	33
Tabel 3.2 Program-Program Urusan Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.....	40
Tabel 3.3 Kegiatan dari Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan..	41
Tabel 4.1 Belanja Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Ringkasan APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2010.....	61
Lampiran 2.	Realisasi Gaji Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2010.....	65
Lampiran 3	Daftar Program & Kegiatan Urusan Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.....	66
Lampiran 4	Matrik Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2010.....	73



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tugas dan Fungsi Pemerintah Negara Indonesia yang tercantum pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah :

1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. memajukan kesejahteraan umum,
3. mencerdaskan kehidupan bangsa,
4. dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanahkan bahwa anggaran pendidikan sejumlah 20% dari APBN dan APBD. Ini untuk menjamin bahwa hak masyarakat mendapat pendidikan dapat terpenuhi. UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 dalam pasal 11 ayat 2 di jelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara.

Untuk memenuhi tugas konstitusi tersebut, pemerintah melakukan serangkaian kebijakan publik sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawabnya. Kebijakan publik tersebut mengatur dan mengikat semua lapisan masyarakat dalam suatu negara. Kebijakan tersebut menyelaraskan peran negara dan masyarakat dalam mencapai tujuan-tujuan bernegara secara efektif dan efisien.

Dengan kebijakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab yang lebih besar dalam menyediakan pelayanan publik demi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Transfer kewenangan tersebut diikuti pula oleh transfer sumber-sumber pendapatan bagi daerah (*money*

follow function). Istilah *money follow function* memiliki tiga komponen utama, yaitu dana, tugas, dan tanggung jawab. Ketiga komponen tersebut harus ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat 1 pun menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien¹, ekonomis², efektif³, transparan⁴, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Aturan-aturan diatas, diantaranya, menyuratkan bahwa dalam penetapan APBD harus didasarkan pada angka-angka yang dapat dipertanggungjawabkan. Angka-angka yang bersumber dari perhitungan yang akurat, bukan kira-kira atau dugaan yang tidak berdasar. Sehingga biaya-biaya yang nanti akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah, terutama dalam hal pendidikan, memang sudah sesuai dan tepat sasaran.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan sebuah proses yang terdiri atas beberapa tahapan dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Keseluruhan proses tersebut dilaksanakan secara simultan melibatkan berbagai pihak dalam struktur pemerintahan daerah dan

¹ Definisi dalam asas umum pengelolaan keuangan daerah adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

² Definisi dalam asas umum pengelolaan keuangan daerah adalah pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah

³ Definisi dalam asas umum pengelolaan keuangan daerah adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

⁴ Definisi dalam asas umum pengelolaan keuangan daerah adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah

meliputi ribuan bahkan jutaan transaksi. Tahapan-tahapan itu juga dituntut agar terlaksana secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Reformasi keuangan daerah yang dilaksanakan dalam 10 tahun terakhir mencoba menempatkan keseluruhan proses pengelolaan keuangan daerah tersebut dalam struktur yang dianggap lebih efisien dan efektif. Salah satu konsekuensi dari reformasi adalah modernisasi pendekatan penganggaran dari yang sebelumnya tradisional menjadi pendekatan kinerja. Bahkan dalam ketentuan paling akhir, kita diamanatkan untuk melakukan proses penganggaran menggunakan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM/MTEF).

Penerapan anggaran berbasis prestasi kerja adalah amanat dari penjelasan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam upaya memperbaiki proses penganggaran di sektor publik. Pendekatan kinerja adalah sebuah teknologi, yang di dalamnya terangkai teknik-teknik penganggaran dalam patron asumsi-asumsi, yang jika rangkaian dan/atau asumsi tersebut tidak terpenuhi maka tujuan reformasi tidak akan tercapai. Anggaran Kinerja adalah suatu pendekatan dimana pemerintah diharapkan lebih menitikberatkan pada aspek kinerja dibandingkan dengan pendekatan tradisional yang lebih berkonsentrasi pada angka-angka semata. Dengan demikian, pendekatan kinerja menuntut adanya indikator, baik pada saat input dikelola maupun pada saat keluaran (output) dan hasil (*outcome*) diperoleh.

Salah satu teknik penting yang digunakan dalam pendekatan kinerja adalah penghitungan biaya satuan (*unit cost*) layanan dalam pengukuran kinerja output program/kegiatan. Pengukuran kinerja pada output menuntut adanya informasi tentang biaya satuan (*unit cost*), karena salah satu kriteria keberhasilan output adalah efektifitas penggunaan biaya. Biaya satuan dengan demikian akan menjadi salah satu alat ukur untuk menguji efisiensi dan efektifitas penggunaan biaya-biaya yang digunakan dalam suatu kegiatan, menambah instrument yang selama ini digunakan yaitu menggunakan pola pengukuran efisiensi berdasarkan perhitungan realisasi anggaran. Selain itu, dengan didapatkannya perhitungan biaya satuan, pemerintah akan dapat mengukur efektifitas penggunaan input dan sumberdaya yang digunakan, sekaligus memberikan *feedback* yang tepat waktu, karena output masih berada dalam frame tahunan.

Di sisi lain, perhitungan biaya satuan sendiri membutuhkan pengetahuan dan tahapan tersendiri karena perhitungannya:

- Membutuhkan teknik dan pemahaman akuntansi biaya
- Membutuhkan infrastruktur yang dapat menghasilkan data2 yang diperlukan untuk perhitungannya

Oleh karena itu, diperlukan sebuah pedoman dalam proses perhitungan tersebut yang sesuai dalam payung peraturan perundangan yang ada.

Dengan klasifikasi belanja yang didasarkan pada Permendagri No. 13 tahun 2006, yang mengklasifikasikan belanja dalam kelompok belanja langsung dan belanja tidak langsung, membuat perhitungan biaya satuan ini akan sedikit *complicated*. Ini disebabkan belanja pegawai dalam bentuk gaji dan upah yang terkait dengan suatu program tidak terdapat dalam program tersebut. Informasinya terdapat dalam belanja tidak langsung. Jadi harus ditelusuri secara seksama. Itupun yang membuat seolah-olah belanja langsung pemerintah, yang dinyatakan dalam bentuk program dan kegiatan, menjadi kecil persentasenya. Ini bisa menimbulkan mispersepsi bagi pembaca APBD dan dokumen terkait lainnya.

Tabel 1.1 Ringkasan APBD Pemerintah Kabupaten Lamongan 2010
urusan Pendidikan⁵

TOTAL BELANJA			Rp 942,039,572,020	100%
URUSAN WAJIB PENDIDIKAN			Rp 369,031,681,350	39.17%
Alokasi	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung		
	Rp 354,784,605,950	Rp 14,247,075,400	Rp 369,031,681,350	
	96.14%	3.86%	100%	

⁵ APBD PEMDA Lamongan 2010 yang lengkap akan terdapat pada Lampiran 1

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui berapa besar sebenarnya biaya satuan dari program-program SKPD Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja. Sehingga bisa dinilai kinerja SKPD dalam pencapaian kinerjanya secara efektif, efisien dan ekonomis.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan yang hendak dibahas dalam tesis ini adalah berapa biaya satuan dari program-program SKPD Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2010 dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada rakyat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya biaya satuan layanan program-program SKPD Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2010 sehingga bisa menghasilkan informasi yang benar untuk digunakan dalam pengambilan kebijakan.

1.4 Ruang Lingkup

Penelitian ini lebih bersifat studi kasus. Objek penelitian adalah data-data dari APBD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan data-data terkait dengan SKPD Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2010.

1.5 Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu deskriptif analitik yang dilakukan melalui:

1. Studi kepustakaan dengan mempelajari karya ilmiah dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti mendapatkan metode analisis yang ideal.
2. Analisis APBD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan data-data terkait dengan SKPD Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2010.
3. Wawancara dan komunikasi dengan pihak yang berkompeten di Pemerintah Kabupaten Lamongan dan pihak lainnya terkait dengan data-data yang diterima oleh penulis.
4. Melakukan analisis biaya satuan layanan sektor publik dengan menggunakan metode yang tepat. Tahapannya sebagaimana berikut (Deddi Nordiawan & Rekan 2009) :
 - Menentukan capaian-capaian kinerja unit atau organisasi sektor publik
 - Menentukan dan mengelompokkan biaya-biaya yang terkait langsung atau tidak langsung dengan capaian-capaian kinerja.
 - Untuk biaya-biaya langsung dilakukan dengan cara penelusuran langsung (*direct tracing*)
 - Mencari *cost driver* (pemicu biaya) dalam melakukan alokasi biaya dari kelompok biaya tidak langsung ke kelompok biaya langsung yang terkait dengan capaian-capaian kinerja.
 - Menganalisis dan membebankan biaya dengan menggunakan alokasi departemen penunjang ke departemen produksi (*support department cost allocation*) yang tepat.
5. Menganalisis hasil perhitungan biaya satuan tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara umum, sistematika penulisan tesis ini terdiri dari lima bab, yaitu:

- BAB 1 : Pendahuluan, bab ini akan mengemukakan latar belakang permasalahan dari penelitian, rumusan masalah sebagai batasan permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian, ruang lingkup dan metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB 2: Tinjauan Pustaka, dalam bab ini akan dipaparkan kajian literatur mengenai pengertian analisis biaya, definisi, konsep biaya dan sistem alokasi biaya sebagai kerangka dan dasar pemikiran dari studi ini.
- BAB 3: Objek Penelitian, bab ini akan menguraikan tentang perencanaan dan penganggaran di SKPD Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2010.
- BAB 4: Bab ini akan menganalisis APBD & Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2010 untuk mendapatkan biaya satuan layanan yang terkait dengan capaian kinerja.
- BAB 5: Kesimpulan dan Saran, bab ini merupakan rangkuman dari keseluruhan studi serta saran yang diajukan penulis.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini akan dibahas mengenai kajian literatur mengenai pengertian anggaran berbasis kinerja, analisis standar belanja, analisis biaya, definisi, konsep biaya dan sistem alokasi biaya sebagai kerangka dan dasar pemikiran yang akan digunakan dalam menentukan biaya satuan layanan SKPD Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2010.

2.1 Anggaran

2.1.1 Definisi dan Konsep

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode

⁶. David Nice (2002) mengartikannya sebagai:

“...making and implementing decisions regarding the acquisition, allocation, and use of resources by government, with a primary focus on money in the modern age.”

Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, anggaran upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan. Namun, tidak tertutup kemungkinan disiapkannya anggaran untuk jangka waktu lebih atau kurang dari setahun⁷.

⁶ Definisi ini sesuai dengan definisi di Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 01 Penyajian Laporan Keuangan

⁷ Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Paragraf 13

Anggaran Pendapatan dan Belanja tersebut terbagi atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2.1.2 Anggaran Berbasis Kinerja

Pada saat ini format laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah mengikuti sistem anggaran kinerja (*performance budgeting*). Anggaran kinerja merupakan sistem anggaran yang lebih menekankan pada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal. Anggaran berbasis kinerja mencoba untuk memberi kepastian bahwa setiap pengeluaran mata anggaran harus memiliki kinerja yang terukur. Keberhasilan suatu pelaksanaan anggaran tidak hanya berhenti pada ketaatan realisasi terhadap rencana, namun yang lebih penting lagi adalah hasil dan implikasi kinerja yang diharapkan dari pengeluaran anggaran tersebut.

Anggaran kinerja menurut Government Performance Result Act (GPRA) tahun 1994 adalah sebagai berikut.

“performance budgeting is a systematic approach to help government become more responsive to the taxpaying public by linking program funding to performance and production.”

Sementara itu, Government of Alberta, Canada mendefinisikan anggaran kinerja: *“ performance budgeting is a system of plaming, budgeting, and evaluation that emphasizes the relationship between money and result expected.”*⁸

⁸ Kedua definisi diatas dikutip dari Sony dkk, Memahami APDD dan Permasalahannya, halaman 81

Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa anggaran kinerja disusun berdasar pada hasil yang ingin dicapai, dari setiap dana yang dikeluarkan sesuai harapan masyarakat.

Sistem anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Sistem ini memerlukan indikator kinerja, standar kinerja, standar biaya, dan *benchmark* dari setiap jenis pelayanan. Anggaran harus didasarkan pada sasaran yang hendak dicapai pada tahun anggaran tersebut, adanya standar pelayanan dan adanya ukuran biaya satuan.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus dapat merencanakan anggarannya berdasarkan tugas pokok dan fungsi, tingkat prioritas setiap pekerjaan, tujuan, dan sasaran tertentu yang disertai indikator penilaian yang jelas dan dapat diukur sehingga masing-masing tingkat dalam suatu unit akan mempunyai suatu tanggung jawab yang jelas.

Dengan sistem ini, biaya satuan untuk setiap jenis pelayanan harus dapat diukur sehingga dapat diketahui tingkat efisiensi dan efektivitas dari setiap jenis pelayanan. Melalui anggaran kinerja akan terlihat hubungan yang jelas antara input, output, dan outcome yang akan mendukung terciptanya system pemerintahan yang baik. Dengan pendekatan kinerja akan terlihat akuntabilitas (*accountability*) dan keterbukaan (*transparency*) dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat⁹

Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja berdasarkan pada:

⁹ dikutip dari Sony dkk, Memahami APDD dan Permasalahannya, halaman 81

- ❖ indikator kinerja, adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan
- ❖ capaian (target) kinerja, merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan
- ❖ analisis standar belanja, merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan
- ❖ standar satuan harga, adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah
- ❖ standar pelayanan minimal, adalah tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah

Selanjutnya, menurut McKinney, dalam Deddi (2010), beberapa keunggulan dari pendekatan kinerja ini adalah sebagai berikut :

- Meringankan pengendalian terhadap input atau masukan sumber daya;
- Melonggarkan pengendalian eksternal dan lebih menekankan pada pengendalian internal organisasi;
- Mengalihkan perhatian dari pengendalian anggaran ke pengendalian administratif;
- Mengatur pelaksanaan audit dan pengendalian atas kegiatan yang telah dilaksanakan secara lebih mantap;
- Mendorong perencanaan dan penjadwalan kerja yang lebih baik;
- Mendorong pertanggungjawaban manajemen;
- Menjadi alat pengendalian manajemen yang penting untuk menganalisis penyimpangan dan kinerja dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁰

¹⁰Disadur dan disarikan dari McKinney, Jerome B. (1986). *Effective Financial Management in Public and Nonprofit Agencies : A Practical and Integrative Approach*. Westport, Connecticut : Quorum Books, Greenwood Press, Inc. Halaman 207.

Namun demikian, di samping keunggulan di atas, McKinney juga mencatat beberapa keterbatasan dan kelemahan dari pendekatan penganggaran ini yaitu sebagai berikut :

- Hasil perhitungan biaya per unit input dan output acapkali tidak akurat karena beberapa faktor eksternal organisasi seringkali berubah dan sulit diprediksikan secara tepat.
- Pengumpulan data yang berguna untuk menentukan biaya per unit sulit tercapai karena laporan anggaran yang dihasilkan pada umumnya tersusun dari suatu sistem pencatatan yang berdasarkan pendekatan belanja, bukan berdasarkan *full cost*;
- Pertanggungjawaban masing-masing unit organisasi sering bias. Hal ini terjadi karena suatu kegiatan seringkali melibatkan lebih dari satu unit organisasi sehingga kontribusi masing-masing unit organisasi yang terlibat terhadap keberhasilan atau kegagalan kegiatan tersebut tidak bisa diidentifikasi secara jelas;
- Lebih menonjolkan pada proses yang dapat dikuantifikasikan dan kurang memperlihatkan tujuan atau hasil akhir yang sifatnya kualitatif.¹¹

2.2 Belanja

Belanja daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Kewajiban tersebut dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

¹¹Ibid., Halaman 217 – 219.

Belanja daerah tersebut dapat dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Klasifikasi tersebut meliputi :

1. Belanja menurut urusan pemerintahan yang terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan
2. Belanja menurut organisasi yaitu disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah.
3. Belanja menurut program dan kegiatan yaitu disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Belanja menurut kelompok belanja yaitu terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Klasifikasi menurut urusan pemerintahan, organisasi dan program dan kegiatan menurut penulis tidak memiliki relevansi dengan penghitungan biaya satuan per unit. Klasifikasi menurut kelompok belanja-lah yang relevan dalam penghitungan biaya satuan per unit

2.2.1 Belanja tidak langsung

Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

1. belanja pegawai, merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. bunga, yaitu digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
3. subsidi, yaitu digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;

4. hibah, yaitu digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
5. bantuan sosial, yaitu digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
6. belanja bagi hasil, yaitu digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
7. bantuan keuangan, yaitu digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan; dan
8. belanja tidak terduga, merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2.2.2 Belanja langsung

Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja terdiri dari:

1. Belanja pegawai, yaitu belanja yang digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah;

2. Belanja barang dan jasa, yaitu belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah; dan
3. Belanja modal, yaitu belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

2.3 Biaya

Istilah biaya (*Cost*) lebih banyak dijumpai di sektor bisnis (komersial) dibandingkan di sektor publik sebab biaya merupakan salah satu informasi penting yang akan dilaporkan dalam laporan laba rugi (*income statement*). Biaya dipahami sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka memperoleh pendapatan. Di dalam Akuntansi Manajemen, biaya memiliki definisi sebagai berikut

- a. *“Cost is the cash or cash equivalent value sacrificed for goods and services that are expected to bring a current or future benefit to the organization. As cost are used up in the production of revenues, they are said to expire. Expired costs are called expenses”*.(Hansen & Mowen, 2003). Biaya adalah kas atau setara kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diharapkan membawa manfaat di masa kini atau masa depan kepada organisasi. Biaya yang digunakan dalam menghasilkan pendapatan disebut telah *expired*. Biaya yang *expire* (habis masa manfaatnya) disebut beban (*expenses*).
- b. *“Cost as a resource sacrificed or forgone to achieve a specific objective”* (Hongren dkk,2006). Biaya adalah sumber daya yang dikorbankan atau akan dihilangkan untuk mencapai tujuan spesifik.

2.3.1 Klasifikasi dan Struktur Biaya

Biaya bila dikaitkan dengan objek biaya (*cost object*) dibagi atas :

- Biaya langsung (*Direct Cost*) yaitu biaya yang terkait dengan objek biaya dan dapat ditelusuri dalam cara yang mudah secara ekonomis. Contohnya adalah Biaya Bahan Material Langsung dan Biaya Tenaga Kerja Langsung
- Biaya tidak langsung yaitu biaya yang terkait dengan objek biaya tapi tidak bisa ditelusuri dalam cara yang mudah secara ekonomis. Disebut juga sebagai Biaya Overhead yaitu biaya-biaya yang berkaitan dengan produksi suatu barang atau jasa *selain* Biaya Bahan Material Langsung dan Biaya Tenaga Kerja Langsung contohnya adalah Biaya Bahan Material Tidak Langsung, Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung, Biaya Asuransi Pabrik dan Biaya Listrik, Air, & Telepon Pabrik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi klasifikasi diatas diantaranya adalah:

- Materialitas.

Semakin besar nilai biaya dari suatu hal atau aktivitas, akan membuat dia menjadi biaya langsung bagi objek biaya, demikian sebaliknya.

- Ketersediaan memperoleh teknologi informasi.

Pengembangan teknologi informasi membuat menjadi mungkin untuk mempertimbangkan biaya-biaya sebagai biaya langsung.

- Design operasi.

Klasifikasi biaya adalah mudah jika sesuatu hal digunakan spesifik untuk objek biaya tertentu sehingga dapat diklasifikasikan sebagai biaya langsung.

Biaya menurut perilakunya (*cost behaviour*), respon terhadap perubahan aktivitas atau input, terbagi atas :

- Biaya variable (*variable cost*) yaitu biaya yang berubah secara proporsional sesuai dengan perubahan aktivitas atau input. Contohnya Biaya Bahan Material Langsung.
- Biaya tetap (*fixed cost*) yaitu biaya, yang dalam *range* tertentu, tidak berubah dengan adanya perubahan aktivitas atau input. Contohnya Biaya Asuransi Pabrik.

Biaya menurut hubungannya dengan produksi barang atau jasa terbagi atas :

- Biaya Produk (*product cost/ inventoriable cost*) yaitu biaya berhubungan dengan produksi suatu produk atau kegiatan.. Contohnya adalah Biaya Bahan Material Langsung, Biaya Tenaga Kerja Langsung dan Biaya Overhead.
- Biaya Periode (*period cost*) yaitu biaya yang tidak berhubungan dengan produksi suatu produk atau kegiatan. Contohnya adalah Beban Pemasaran dan Beban Administrasi Kantor (bukan pabrik)

Dalam akuntansi manajemen dikenal pula konsep biaya utama (*prime cost*) dan biaya konversi (*conversion cost*). Biaya utama adalah biaya material langsung ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung. Biaya konversi adalah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik..

Dalam pengambilan keputusan dikenal juga konsep biaya relevan (*relevant cost*) dan biaya tidak relevan (*irrelevant cost*). Dikatakan relevan bila memenuhi dua syarat yaitu biayanya terjadi di masa mendatang (*future cost*) dan keterjadiannya berbeda di antara alternatif pilihan yang ada (*difference among the alternatives*). Bila tidak terpenuhi semuanya atau hanya satu saja terpenuhinya, dianggap sebagai biaya tidak relevan (*irrelevant cost*) dalam pengambilan keputusan.

2.3.2 Perhitungan Biaya per Unit (*Unit Cost*)

Dalam perhitungan yang sederhana dan dengan informasi yang mudah, kita dapat menentukan biaya per unit (*unit cost*). Biaya per unit didapat dari menjumlahkan semua biaya produksi terkait yaitu Biaya Bahan Baku Langsung, Biaya Tenaga Kerja Langsung, dan Biaya Overhead. Contohnya dibawah ini, diasumsikan unit produksinya adalah 800

Tabel 2.1 Perhitungan Biaya Per Unit

Jenis Biaya	Total Biaya	% Biaya	Unit	Biaya per unit
Biaya Bahan Baku Langsung	Rp 8,000,000	51.95%	/ 800	Rp 10,000
Biaya Tenaga Kerja Langsung	Rp 5,000,000	32.47%	/ 800	Rp 6,250
Biaya Overhead	Rp 2,400,000	15.58%	/ 800	Rp 3,000
Total Biaya	Rp 15,400,000	100.00%	/ 800	Rp 19,250

Dari data tabel diatas kita bisa mengetahui bahwa untuk membuat satu unit produk biayanya adalah Rp. 19.250, kemudian Biaya Bahan Baku Langsung per unit adalah Rp. 10.000, Biaya Tenaga Kerja Langsung per unit adalah Rp. 6.250, dan Biaya Overhead per unitnya adalah Rp. 3.000. Kitapun tahu bahwa Biaya Bahan Baku Langsung persinya adalah 51,95% dari total biaya. Begitu pun dengan Biaya Tenaga Kerja Langsung 32,47% dan Biaya Overhead 15,58% dari total biaya.

Informasi ini bisa dijadikan standar dalam pembuatan produk untuk periode berikutnya dan juga bisa dijadikan standar biaya. Bila akan membuat 1.000 unit, biayanya adalah $1.000 \times \text{Rp}19.250 = \text{Rp. } 19.250.000,-$.

Pihak manajemen dapat melakukan analisis dan evaluasi bila ternyata biayanya tidak sesuai dengan yang direncanakan. Dia bisa meneliti dari komponen biayanya, Biaya Bahan Baku Lansung, Biaya Tenaga Kerja Langsung dan dari Biaya Overhead apakah sudah sesuai dengan standar biaya atau sebaliknya.

2.3.3 Alokasi Biaya (*Cost Allocation*)

Dalam perusahaan yang semakin berkembang, produk-produk yang dihasilkan akan bertambah sesuai dengan peluang dan permintaan pasar. Ini akan mengakibatkan bertambah juga bagian-bagian, divisi-divisi dan pusat-pusat pertanggung jawaban dalam perusahaan. Bagian-bagian, divisi-divisi dan pusat-pusat pertanggung jawaban dalam perusahaan tersebut memiliki tugas masing-masing yang dilakukannya.

Bila disederhanakan akan terbagi menjadi bagian Departemen Produksi atau Utama dan Departemen Penunjang. Selain itu ada juga Departemen yang tidak terkait sama sekali dengan kegiatan produksi. Departemen Produksi adalah departemen yang langsung terkait dengan produksi produk-produk barang atau jasa, sementara Departemen Penunjang berfungsi untuk mendukung jalannya Departemen Produksi dan berfungsi hal-hal yang tidak terkait atau tidak bisa ditangani oleh departemen produksi. Diantara Departemen Penunjangpun terkadang saling menggunakan jasa departemennya.

Contoh dari Departemen Produksi dan Departemen Penunjang adalah sebagaimana dibawah ini

Tabel 2.2 Departemen Produksi dan Departemen Penunjang

	Departemen Produksi		Departemen Penunjang	
	Perakitan	Finishing	Kantin	Kebersihan
Manufaktur: Pembuatan Mobil				
Jasa : Perbankan	Kredit Rumah	Kredit Investasi	Teknologi Informasi	Administrasi Bank

Dalam penentuan biaya dari departemen produksi, bahkan biaya produk atau jasa per unit, tentu harus memperhitungkan dan memasukkan biaya dari Departemen Penunjang. Memang betul biaya tersebut bukan langsung timbul dari departemennya, tapi Departemen Produksi itu merasakan juga keuntungan dari Departemen

Penunjang. Tanpa adanya Departemen Penunjang, Departemen Produksi tidak akan berjalan baik dan maksimal.

Proses menghitung dan memasukkan biaya dari Departemen Penunjang ke Departemen Produksi dikenal dengan istilah **Alokasi Biaya** (*Cost Allocation*), lebih tepatnya adalah Alokasi Departemen Penunjang ke Departemen Produksi. Istilah alokasi biayapun, digunakan dalam membebankan biaya tidak langsung ke suatu produk.

Tujuan Alokasi Departemen Penunjang ke Departemen Produksi sesuai dengan *Institute Management Accounting (IMA)*¹² adalah:

1. Memperoleh harga yang dapat disetujui secara menguntungkan
2. Menghitung profotabilitas lini produk
3. Prediksi efek ekonomi pada perencanaan dan pengendalian
4. Menilai inventory
5. Memotivasi manajer.

Adapun langkah-langkah dalam alokasi biaya adalah:

1. Menentukan mana Departemen Produksi atau Utama dan mana Departemen Penunjang
2. Telusuri dan masukkan semua biaya yang terkait dengan masing-masing Departemen
3. Tentukan *cost driver* (hal yang membuat perubahan biaya suatu produk atau jasa), sebagai dasar alokasi dari masing-masing Departemen Penunjang ke Departemen Produksi atau Utama

¹² Statement of Management Accounting (Statement 4B), "Allocation of Service and Administrative Costs" (Montvale, NJ: NAA, 1985)

4. Alokasikan semua biaya dari Departemen Penunjang ke Departemen Produksi atau Utama.
5. Tentukan biaya per unit dari Departemen Produksi.

Setelah Alokasi Biaya, departemen penunjang tidak memiliki biaya lagi menjadi nol. Semua biaya departemen penunjang berpindah ke departemen produksi.

Ada Tiga Metode dalam Alokasi Biaya Departemen Penunjang ke Departemen Produksi. Metode-tersebut adalah :

1. *Direct Method*. Metode ini **langsung** memberikan biaya departemen penunjang ke departemen produksi tanpa mempertimbangkan penggunaan diantara departemen penunjang. Jadi walaupun diantara departemen penunjang menggunakan sumber daya dari departemen penunjang lainnya, penggunaan tersebut tidak dipertimbangkan dalam alokasi dari departemen penunjang ke departemen produksi.
2. *Sequential* atau *Step Down Method*. Metode ini memberikan biaya departemen penunjang ke departemen produksi dengan mempertimbangkan penggunaan bertahap diantara departemen penunjang. Departemen Penunjang awal yang telah memberikan alokasi biayanya, diantaranya ke departemen penunjang yang lain, tidak mendapatkan alokasi biaya dari departemen penunjang yang lain tersebut. Departemen penunjang yang lain setelah mendapat alokasi dari Departemen Penunjang awal kemudian mengalokasikan biayanya ke Departemen Produksi **tanpa** mengalokasikan ke departemen penunjang awal. Departemen Penunjang awal yang mula-mula juga mengalokasikan biaya ke departemen penunjang lainnya biasanya mempunyai biaya yang lebih besar diantara departemen penunjang.
3. *Reciprocal* atau *Algebra Method*. Metode ini memberikan biaya departemen penunjang ke departemen produksi dengan

mempertimbangkan saling penggunaan diantara departemen penunjang. Jadi diantara departemen penunjang akan saling memberikan dan menerima biaya dari departemen penunjang lainnya.

Aturan tambahan untuk proses alokasi adalah dalam alokasi suatu departemen penunjang, tidak dihitung penggunaan atas dirinya oleh departemen tersebut.

Sebagai ilustrasi akan diberikan data-data terkait contoh proses alokasi

Tabel 2.3 Data Awal Perusahaan XYZ

	Departemen Penunjang		Departemen Produksi	
	Teknologi Informasi	Administrasi Bank	Kredit Rumah	Kredit Investasi
Total Biaya masing-masing departemen	2,000	1,000	4,000	3,000
Jumlah Komputer	4	5	13	7
Pegawai	5	4	4	6

Perusahaan XYZ yang bergerak di bidang perbankan memiliki dua departemen utama atau produksi yaitu departemen yang menangani kredit rumah dan departemen yang menangani kredit investasi. Departemen tersebut didukung oleh departemen penunjang yaitu departemen teknologi informasi dan departemen administrasi bank.

Sebelum dialokasikan masing-masing departemen memiliki biaya sebagai berikut. Departemen Kredit Rumah Rp. 4.000,-, Departemen Kredit Investasi Rp. 3.000,-, Departemen Teknologi Informasi Rp. 2.000,- dan Departemen Administrasi Bank Rp. 1.000,-.

Kita akan mengalokasikan biaya dari departemen penunjang ke departemen utama. Adapun dasar alokasi departemen teknologi informasi adalah jumlah komputer yang digunakan dan dimiliki oleh departemen yang lain sedang dasar

alokasi departemen administrasi adalah jumlah pegawai yang bekerja di departemen yang lain. Hasilnya adalah sebagai berikut.

a. *Direct Method* (Metode Langsung)

- Alokasi Departemen Teknologi Informasi ke Departemen Produksi

$$\text{Departemen Kredit Rumah} : \frac{13}{20} \times 2.000 = 1.300$$

$$\text{Departemen Kredit Investasi} : \frac{7}{20} \times 2.000 = 700$$

- Alokasi Departemen Administrasi Bank ke Departemen Produksi

$$\text{Departemen Kredit Rumah} : \frac{4}{10} \times 1.000 = 400$$

$$\text{Departemen Kredit Investasi} : \frac{6}{10} \times 1.000 = 600$$

Setelah alokasi biaya, Departemen Teknologi Informasi dan Administrasi Bank menjadi Rp. 0 (nol) sedangkan Departemen Kredit Rumah menjadi Rp 5.700 dan Departemen Kredit Investasi menjadi Rp. 4.300.

b. *Sequential* atau *step down method*

- Departemen Teknologi Informasi akan dialokasikan terlebih dahulu karena memiliki nilai biaya yang besar.

$$\text{Departemen Kredit Rumah} : \frac{13}{25} \times 2.000 = 1.040$$

$$\text{Departemen Kredit Investasi} : \frac{7}{25} \times 2.000 = 560$$

$$\text{Departemen Administrasi Bank} : \frac{5}{25} \times 2.000 = 250$$

- Departemen Administrasi Bank biayanya bertambah menjadi 1.250 yang kemudian akan dialokasikan ke Departemen Utama.

$$\text{Departemen Kredit Rumah} : \frac{4}{10} \times 1.400 = 560$$

$$\text{Departemen Kredit Investasi} : \frac{6}{10} \times 1.400 = 840$$

Setelah alokasi biaya, Departemen Teknologi Informasi dan Administrasi Bank menjadi Rp. 0 (nol) sedangkan Departemen Kredit Rumah menjadi Rp 5.600 dan Departemen Kredit Investasi menjadi Rp. 4.400.

c. *Resiprocal* atau *Algebra Method*

Dalam metode ini diperhitungkan penggunaan diantara departemen penunjang. Biaya Departemen Teknologi Informasi sebenarnya tidak hanya Rp 2.000 tapi harus ditambah dengan penggunaan pegawai pada Departemen Administrasi Bank. Secara matematis nilainya biaya Departemen Teknologi Informasi adalah $TI = 2.000 + (5/15) AB$. Ini karena dia menggunakan 5 pegawai dari total 15 pegawai yang dijadikan dasar alokasi Departemen Administrasi Bank. Biaya Departemen Administrasi Bank pun harus mempertimbangkan penggunaan komputer atas Departemen Teknologi Informasi. Secara Matematis nilai biaya Departemen Administrasi Bank adalah $AB = 1.000 + (5/25) TI$. Ini karena dia menggunakan 5 komputer dari total 25 komputer yang dijadikan dasar alokasi Departemen Teknologi Informasi. Metode ini dapat diselesaikan dengan menggunakan metode substitusi atau eliminasi. Pada saat ini, kita akan menyelesaikan dengan metode substitusi.

Persamaan baru yang terbentuk adalah:

$$TI = 2.000 + (5/15) AB$$

$$AB = 1.000 + (5/25) TI$$

Kita substitusikan AB ke TI

$$TI = 2.000 + (5/15) \times ((1.000 + (5/25) TI))$$

$$TI = 2.000 + 333,33 + 0,067 TI$$

$$0,933 TI = 2.333,33$$

$$TI = \frac{2.333,33}{0,933} = 2.500 \text{ (pembulatan)}$$

$$AB = 1.000 + (5/25) TI$$

$$AB = 1.000 + (5/25) 2.500$$

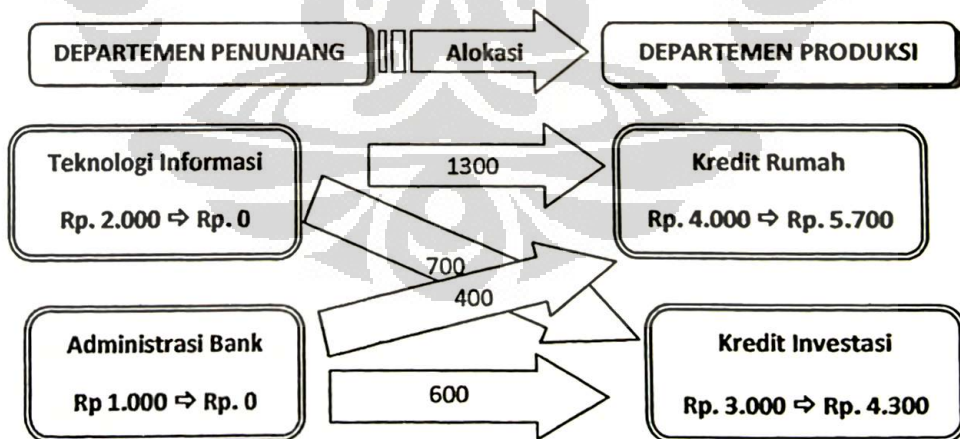
$$AB = 1.500$$

- Alokasi Departemen Teknologi Informasi menjadi
 - Departemen Administrasi Bank = $\frac{5}{25} \times 2.500 = 500$
 - Departemen Kredit Rumah = $\frac{13}{25} \times 2.500 = 1.300$
 - Departemen Kredit Investasi = $\frac{7}{25} \times 2.500 = 700$
- Alokasi Departemen Administrasi Bank menjadi
 - Departemen Teknologi Informasi = $\frac{5}{15} \times 1.500 = 500$
 - Departemen Kredit Rumah = $\frac{4}{15} \times 1.500 = 400$
 - Departemen Kredit Investasi = $\frac{6}{25} \times 1.500 = 600$

Setelah alokasi biaya, Departemen Teknologi Informasi dan Administrasi Bank menjadi Rp. 0 (nol) sedangkan Departemen Kredit Rumah menjadi Rp 5.700 dan Departemen Kredit Investasi menjadi Rp. 4.300

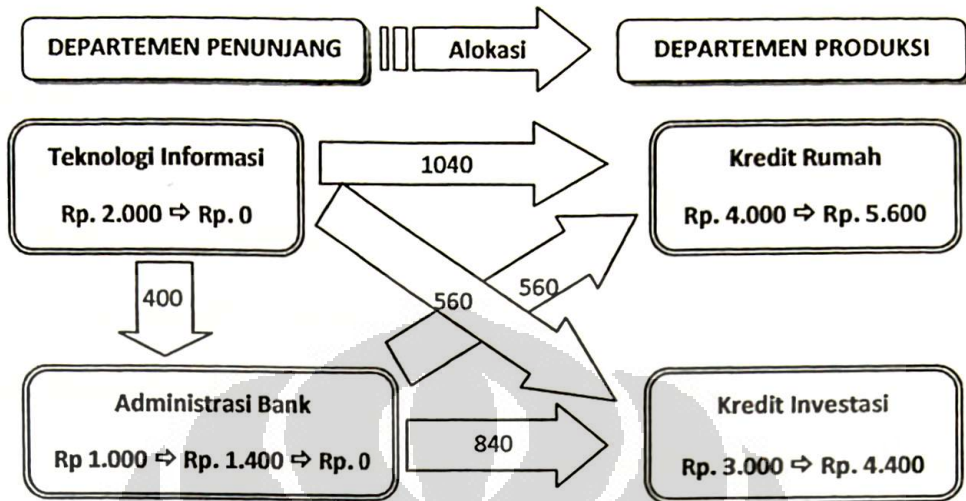
Dalam bentuk diagram, ketiga metode alokasi diatas adalah sebagai berikut :

1. *Direct Method*



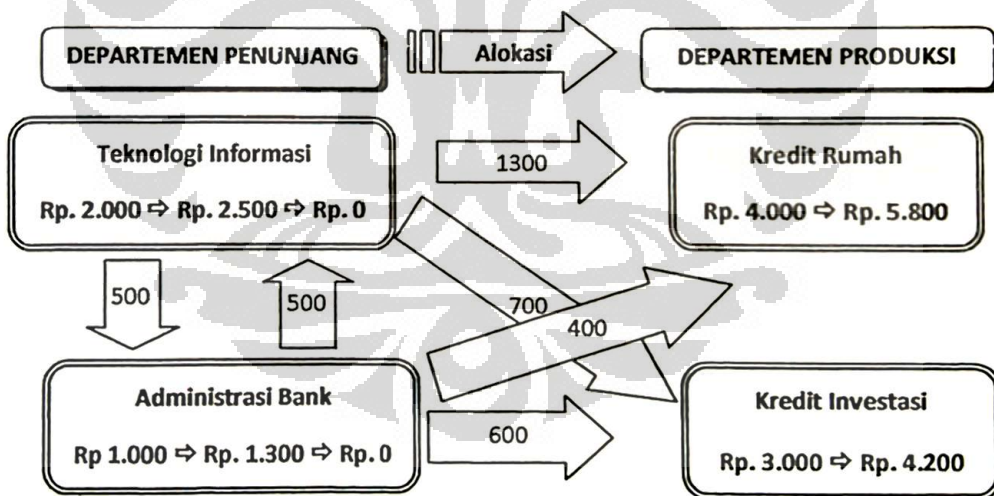
Gambar 2.1 Contoh Alokasi Biaya Metode *Direct Method*

2. *Sequential* atau *Step Down Method*



Gambar 2.2 Contoh Alokasi Biaya Metode *Sequential* atau *Step Down Method*

3. *Reciprocal* atau *Algebra Method*



Gambar 2.3 Contoh Alokasi Biaya Metode *Reciprocal* atau *Algebra Method*.

2.4 Mekanisme Penghitungan Unit *Cost* dalam Sektor Publik¹³

Deddi (2009) memberikan langkah-langkah dalam melakukan perhitungan biaya satuan dalam sektor publik sebagaimana berikut:

1. Menentukan unit
2. Menentukan klasifikasi dan menghitung biaya
3. Menentukan biaya satuan

2.4.1 Menentukan Unit

Unit adalah produk atau aktivitas yang menjadi obyek perhitungan unit *cost*. Bagi pemerintah daerah, obyek perhitungan unit *cost* ditentukan berdasarkan target capaian kinerja di setiap urusan yang dikelola SKPD. Target capaian kinerja tersebut dapat dikembangkan dan/atau diturunkan dari SPM yang ada maupun target misi daerah yang terdapat dalam dokumen perencanaan. Langkah berikutnya adalah menentukan satuan dari capaian target yang telah ditetapkan.

Misalnya, dalam urusan pendidikan ditetapkan :

No.	Target Capaian	Satuan
1	Penyelenggaraan Pendidikan PAUD	Jumlah Anak
2	Penyelenggaraan Pendidikan Dasar	Jumlah Anak % Angka Partisipasi Sekolah

2.4.2 Menentukan Klasifikasi dan Menghitung Biaya

Berdasarkan data dan informasi yang terdapat di anggaran maupun laporan realisasi anggaran, Pemda melakukan *mapping* (reklasifikasi) untuk mendapatkan klasifikasi biaya sebagai berikut:

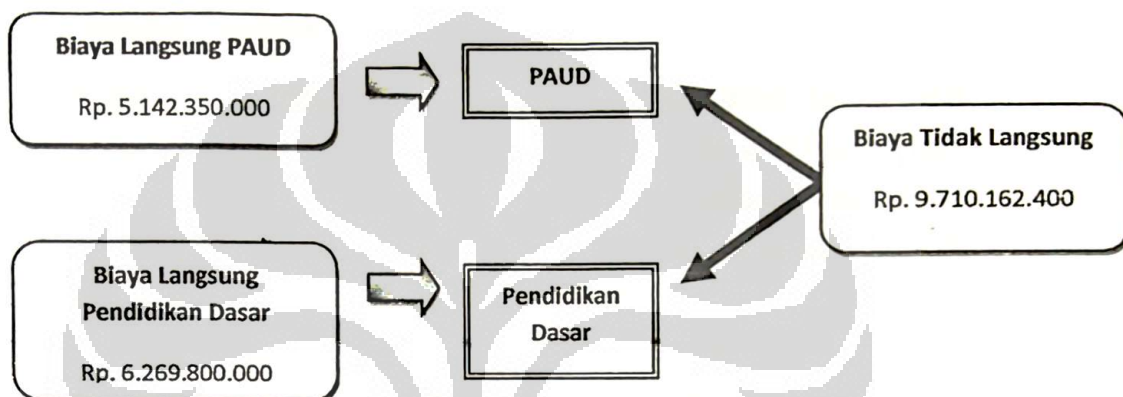
- Biaya Langsung

¹³ Informasi dalam sub-bab ini dikutip dari paper Deddi Nordiawan, *Klasifikasi Belanja dan Perhitungan Biaya Aktivitas*, Jakarta. 1 Juni 2009.

- Biaya Tidak Langsung
- Biaya Tidak Terkait Capaian Kinerja

2.4.3 Menentukan Unit Cost

Berdasarkan klasifikasi biaya tersebut, dilakukan perhitungan unit cost dengan terlebih dahulu melakukan alokasi biaya tidak langsung.



Gambar 2.4 Alokasi Unit Cost

Alokasi biaya tidak langsung untuk dua kegiatan di atas dihitung berdasarkan proporsi Belanja Gaji. Misal Total Gaji Guru PAUD Rp. 2.000.000.000,- dan Total Gaji Guru Pendidikan Dasar Rp. 5.500.000.000,- . Total biaya tidak langsung untuk dua kegiatan ini adalah sebesar Rp. 9.710.162.400.

Alokasi Biaya tidak langsung untuk PAUD:

$$\frac{2.000.000.000}{(2.000.000.000 + 5.500.000.000)} \times \text{Rp. } 9.710.162.400$$

$$= \text{Rp. } 2.589.376.640$$

Alokasi biaya tidak langsung untuk Pendidikan Dasar:

$$\frac{5.500.000.000}{(2.000.000.000 + 5.500.000.000)} \times \text{Rp. } 9.710.162.400$$

$$= \text{Rp. } 7.120.785.760$$

Dengan demikian kita akan mendapatkan biaya kegiatan masing-masing sebagai berikut :

No.	Target Capaian	Biaya Langsung	Alokasi Biaya Tidak Langsung	Unit Cost
1	Penyelenggaraan Pendidikan PAUD	5,142,350,000	2,589,376,640	7,731,726,640
2	Penyelenggaraan Pendidikan Dasar	6,269,800,000	7,120,785,760	13,390,585,760

2.5 Penelitian Sebelumnya

Penelitian-penelitian sebelumnya terkait biaya satuan, antara lain :

- Penelitian yang dilakukan oleh Dian Kartikasari W. (2010) dengan judul analisis biaya satuan layanan perpustakaan umum daerah, studi kasus: kantor perpustakaan dan arsip jakarta pusat. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitik dengan menggunakan data pengeluaran biaya selama Januari 2007—Desember 2008. Penghitungan biaya satuan kegiatan menggunakan metode pembiayaan berbasis aktivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sistem pendokumentasian data belum dipersiapkan untuk mendukung analisis biaya. Hasil perhitungan biaya satuan kegiatan pelayanan perpustakaan umum daerah antara tahun 2008 dengan tahun 2007 menunjukkan bahwa untuk kegiatan perawatan koleksi perpustakaan, seleksi dan prosesing layanan perpustakaan, inventarisir dan penataan buku serta tata usaha, biaya satuan di tahun 2008 lebih rendah dibanding tahun 2007, namun untuk biaya satuan kegiatan pelayanan perpustakaan dan biaya total seluruh kegiatan per pengunjung untuk tahun 2008 lebih tinggi dibandingkan tahun 2007.
- Penelitian yang dilakukan oleh Utami (2000) yang melakukan studi mengenai analisis biaya untuk menentukan biaya satuan makan pasien di instalasi gizi Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. Dalam penelitian ini mengangkat masalah bagaimana menentukan biaya satuan makan pasien dengan metode analisa biaya pada pasien rawat inap berdasarkan kelas perawatan, tanpa membedakan jenis diit yang diberikan. Pada penelitian ini mempergunakan

analisa biaya dengan metode distribusi ganda (*Double Distribution Method*). RSMS Purwokerto merupakan Rumah Sakit tipe B non pendidikan dengan kapasitas tempat tidur 400 buah dan BOR 72,48%. dari hasil tender paket makanan/pasien/hari untuk kelas utama Rp 10.000,-; kelas I Rp 8.000,-; kelas II Rp 6.650,-; dan kelas III Rp 4950,-. perincian harga ini meliputi biaya bahan makanan, biaya bahan bakar dan biaya tenaga panyaji makanan sebanyak 28 orang dengan pelayanan makanan sampai ke pasien dengan operasional pelaksanaannya di Rumah Sakit. Biaya setahun dari hasil analisa biaya makan didapatkan hasil untuk makan pasien kelas utama Rp 15.404,-; kelas I Rp 11.262,-; kelas II Rp 10.053,- dan kelas III Rp 8.449,- dari hasil perhitungan analisa biaya dibandingkan dengan harga makan pasien yang telah ditenderkan dan dianggap sebagai tarif harga makanan pasien, pihak Rumah Sakit masih harus menutup selisih biaya untuk kelas perawatan, dengan tingkat kerugian Rumah Sakit sebesar Rp 24.150.272,- dalam 1 bulan. Kebijakan Rumah Sakit dengan sistem pengelolaan tersebut supaya tidak mengalami kerugian dan demi terselenggaranya makananpasien di Rumah Sakit, dapat dilakukan usaha dengan cara mengurangi tingkat kebocoran bahan makanan pendayagunaan tenga dan penghematan atau efisiensi.

- Penelitian yang dilakukan oleh Fatimah (2002) yang melakukan studi mengenai analisis biaya satuan pelayanan kebersihan di suku dinas kebersihan Jakarta Timur untuk mengetahui biaya penyelenggaraan pelayanan kebersihan yang diberikannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya satuan tanpa investasi untuk pusat penyapuan sebesar Rp. 11.983.656,00 per output; untuk pengangkutan sampah sebesar Rp. 11.954,00 per output, dan penanganan air kotor Rp. 192.321,00 per output.

Penulis mencoba melakukan perhitungan biaya satuan layanan terkait capaian kinerja dengan menggunakan teknik akuntansi biaya berupa sistem alokasi dengan mengambil studi kasus di SKPD Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

BAB 3

OBJEK PENELITIAN

Pada bagian ini akan dibahas mengenai perencanaan dan penganggaran di SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan tahun 2010

16

3.1 Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka dalam menjalankan roda pemerintahan di Daerah sebagai bagian dari Otonomi Daerah diperlukan adanya suatu perencanaan strategis dan perencanaan kerja yang merupakan bagian dari manajemen Rencana Strategis Daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan telah disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2010 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 24 Tahun 2009. Penjabaran RKPD oleh SKPD disusun dalam bentuk dokumen rencana kerja SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas pendidikan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dinas Pendidikan sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2010 yang berisi kebijakan pembangunan baik yang terkait dengan

¹⁶ Informasi yang terdapat dalam Bab ini berasal dari Rencana Kinerja (Renja) Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2010

kebijakan APBD maupun yang diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

3.2. Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

“ Melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendidikan ”.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis dan Strategis di bidang Pendidikan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang Pendidikan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pendidikan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dalam menjalankan kedudukan, tugas dan fungsinya perlu adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan tingkat pendidikan, jabatan, pangkat / golongannya. Kondisi kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan hingga Januari tahun 2010 secara singkat dipaparkan dalam tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Data Pejabat Struktural dan Staf
Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
Tahun 2010

Unit Kerja	Eselon				PNS / Golongan			
	IV	III	II	I	II	III	IV	
*) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan			1				1	
- Sekretaris		1					1	
Ka Sub Bagian Umum	1					1		
Ka Sub Bagian Kepegawaian	1					1		
Ka Sub Bagian Keuangan	1					1		
Staf				3	13	17		
- Ka Bidang Pendidikan TK/SD		1					1	
Kasi Kurikulum dan Kesiswaan	1						1	
Kasi Pengelolaan Sekolah dan Tenaga Edukatif	1						1	
Kasi Sarana dan Prasarana Sekolah	1					1		
Staf					4	10		
- Ka Bidang Dikmenumjur		1					1	
Kasi Kurikulum dan Kesiswaan	1						1	
Kasi Pengelolaan Sekolah dan Tenaga Edukatif	1						1	
Kasi Sarana dan Prasarana Sekolah	1					1		
Staf					2	5	1	
- Ka Bidang PLS		1					1	
Kasi PAUD	1						1	
Kasi Pendidikan Masyarakat	1					1		
Kasi Olahraga dan Seni Pelajar	1					1		
Staf					2	8		
- Ka Bidang PEP		1					1	
Kasi Pendataan dan Pengkajian	1					1		
Kasi Perencanaan	1					1		
Kasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1					1		
Staf					2	4		
- Pengawas Dikmenumjur							15	
- Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan	27					10	17	
Staf				2	73	187	149	
JUMLAH	41	5	1	5	95	251	192	
JUMLAH TOTAL		48			546			

Sumber : Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2010

Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Pendidikan membawahi Sekretariat dan 4 Bidang serta Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Sekretariat adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, kelembagaan, kehumasan, kepegawaian dan keuangan membawahi Sub Bagian Umum, Sub Bagian Kepegawaian, dan Sub Bagian Keuangan.

Bidang Pendidikan TK/SD adalah unsur pelaksana dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, pemberian bimbingan teknis. Bidang TK/SD meliputi; kurikulum dan kesiswaan, pengelolaan sekolah dan pembinaan tenaga edukatif, sarana dan prasarana. Bidang TK/SD terdiri dari ; Seksi Kurikulum dan Kesiswaan, Seksi Pengelolaan Sekolah dan Tenaga Edukatif, serta Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah.

Bidang Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan (Dikmenumjur) adalah unsur pelaksana dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian bidang pendidikan menengah umum dan kejuruan meliputi kurikulum dan kesiswaan, pengelolaan sekolah, pembinaan tenaga edukatif, dan perguruan tinggi serta dan prasarana sekolah. Bidang Dikmenumjur terdiri dari Seksi Kurikulum dan Kesiswaan, Seksi Pengelolaan Sekolah dan Tenaga Edukatif, serta Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah.

Bidang Pendidikan Luar Sekolah adalah unsur pelaksana dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian bidang pendidikan luar sekolah. Bidang Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari Seksi Pendidikan Usia Dini, Seksi Pendidikan Masyarakat, Seksi Pendidikan Olah Raga dan Seni Pelajar.

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan adalah unsur pelaksana dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penelitian, pengkajian, dan pengembangan, menyusun rencana program, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan terdiri dari; Seksi Pendataan dan Pengkajian, Seksi Perencanaan, Seksi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional diwilayah dikoordinasikan oleh Camat.

3.3 Visi dan Misi

Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan mempunyai Visi:

“MENJADI PUSAT PELAYANAN DAN PENGGERAK DALAM MEMBENTUK MANUSIA YANG BERIMAN BERTAQWA, BERBUDI LUHUR, TRAMPIL, TANGGUH, MANDIRI, INOVATIF, DAN DEMOKRATIS MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA”.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan mempunyai misi, yaitu:

1. Meningkatkan keimanan, ketaqwaan, budi pekerti luhur dalam kehidupan sehari-hari.
2. Meningkatkan kinerja pengelolaan Pendidikan demi terwujudnya pelayanan Prima.
3. Menyempurnakan manajemen Pendidikan dan Kebudayaan agar efektif dan efisien sesuai dengan tuntutan zaman.
4. Menuntaskan wajib belajar 9 tahun dan pemberantasan buta aksara serta baca tulis Al Qur'an.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat termasuk perantau dalam penyelenggaraan pendidikan.
6. Meningkatkan kerjasama unsur dalam pengelolaan Pendidikan.
7. Menyelenggarakan Pendidikan per Sekolah dan Luar Sekolah yang profesional, mandiri, kreatif, berwawasan global dan berjiwa kewirausahaan.
8. Mewujudkan masyarakat yang berprestasi dalam olahraga, seni dan budaya.
9. Mewujudkan masyarakat yang gemar membaca, mencintai ilmu pengetahuan dan membudayakan pola pikir ilmiah serta peduli terhadap lingkungan.

Misi secara eksplisit menyatakan apa yang harus dicapai oleh suatu organisasi dan kegiatan spesifik apa yang harus dilaksanakan dalam pencapaiannya

3.4 Tujuan, Sasaran dan Kebijakan

Berdasarkan visi dan misi yang telah diuraikan diatas Dinas Pendidikan kabupaten Lamongan menetapkan 2 (dua) tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman.
2. Meningkatkan apresiasi seni dan budaya bagi pelajar.

Sasaran merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan berdasarkan tujuan yang telah diuraikan diatas Dinas Pendidikan menetapkan 5 (lima) sasaran sebagai berikut :

- I. Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan
- II. Meningkatkan Keterjangkauan Layanan Pendidikan
- III. Meningkatkan Kualitas / Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan
- IV. Meningkatkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan
- V. Meningkatkan Kepastian / Keterjaminan Memperoleh Layanan Pendidikan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran bidang pendidikan di Kabupaten Lamongan, yaitu meningkatkan Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan dan sesuai dengan perkembangan kemajuan zaman, menetapkan arah dan kebijakan strategis sebagai berikut :

- I. Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan.
 1. Tersedia Layanan PAUD Berkualitas
 2. Tersedia Layanan Pendidikan Dasar Berkualitas
 3. Tersedia Layanan Pendidikan Menengah yang Berkualitas dan Relevan
 4. Tersedia Layanan Pendidikan Tinggi Berkualitas, Relevan, dan Berdaya Saing Internasional
 5. Tersedia Layanan Pendidikan Orang Dewasa Berkelanjutan
 6. Tersedianya Sistem Tata Kelola yang Handal

II. Meningkatkan Keterjangkauan Layanan Pendidikan

1. Terjangkaunya Layanan PAUD Berkualitas
2. Terjangkaunya, dan Terjaminnya Kepastian Meperoleh Layanan Pendidikan Dasar Berkualitas
3. Terjangkaunya Layanan Pendidikan Menengah yang Berkualitas dan Relevan
4. Terjangkaunya Layanan Pendidikan Tinggi Berkualitas, Relevan, dan Berdaya Saing Internasional
5. Terjangkaunya Layanan Pendidikan Orang Dewasa Berkelanjutan

III. Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan

1. Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan PAUD Berkualitas
2. Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan Dasar Berkualitas
3. Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan Menengah yang Berkualitas dan Relevan
4. Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan Tinggi Berkualitas, Relevan, dan Berdaya Saing Internasional
5. Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan Orang Dewasa Berkelanjutan

IV. Meningkatkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan

1. Meningkatkan kesetaraan Layanan PAUD
2. Meningkatkan kesetaraan Meperoleh Layanan Pendidikan Dasar Berkualitas
3. Meningkatkan kesetaraan Layanan Pendidikan Menengah yang Berkualitas dan Relevan
4. Meningkatkan kesetaraan Layanan Pendidikan Tinggi Berkualitas, Relevan, dan Berdaya Saing Internasional
5. Meningkatkan kesetaraan Layanan Pendidikan Orang Dewasa Berkelanjutan

V. Meningkatkan Kepastian/Keterjaminan Memperoleh Layanan Pendidikan

1. Meningkatkan kepastian/keterjaminan memperoleh Layanan PAUD
2. Meningkatkan kepastian/keterjaminan Meperoleh Layanan Pendidikan Dasar Berkualitas
3. Meningkatkan kepastian/keterjaminan Layanan Pendidikan Menengah yang Berkualitas dan Relevan
4. Meningkatkan kepastian/keterjaminan Layanan Pendidikan Tinggi Berkualitas, Relevan, dan Berdaya Saing Internasional
5. Meningkatkan kepastian/keterjaminan Layanan Pendidikan Orang Dewasa Berkelanjutan

3.5 Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2010

Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan sesuai dengan RAPBD tahun 2010 adalah sejumlah Rp 369.031.681.350,00. Jumlah ini terbagi atas biaya langsung sejumlah Rp. 14.247.075.400,00 dan biaya tidak langsung sejumlah 354.784.605.950,00¹⁷.

Biaya tidak langsung diberikan untuk gaji dan tunjangan pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan baik di jajaran SD, SMP, SMA/SMK, serta guru diperbantukan sebanyak 8.359 orang dengan nilai Gaji dan Tunjangan PNS senilai Rp 336.476.161.000,00 dan Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja senilai Rp 18.308.444.950,00. Informasi lebih detail dan lengkap akan diberikan dalam lampiran 2.

Untuk biaya langsung terbagi untuk menangani dua urusan pemerintah yaitu pendidikan dengan anggaran Rp 14.117.075.400,00 dan kepemudaan & olahraga dengan anggaran Rp 130.000.000,00.

¹⁷ Informasi lebih lengkap tentang RAPBD Kabupaten Lamongan tahun 2010 akan disertakan dalam bagian Lampiran I

Untuk urusan pendidikan yang menjadi urusan utama dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan terdapat banyak program yang akan diberikan dibawah ini beserta jumlah anggarannya.

Tabel 3.2 Program-Program Urusan Pendidikan
Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Program	Jumlah (Rp)
Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.838.715.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	361.500.000
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	20.000.000
Pendidikan Anak Usia Dini	2.222.100.000
Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	6.185.620.400
Pendidikan Menengah	1.133.250.000
Pendidikan Non Formal	70.000.000
Pendidikan Luar Sekolah	65.000.000
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	85.890.000
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	25.000.000
Manajemen Pelayanan Pendidikan	100.000.000
Pendidikan Perguruan Tinggi	10.000.000
Total	14.117.075.400

Sumber: diolah dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Lamongan 2010

Masing-masing program memiliki kegiatan-kegiatan tersendiri. Menimbang banyaknya kegiatan dan keterbatasan halaman disini, informasi lebih detail dan lengkap akan diberikan dalam lampiran 3.

Urusan kepemudaan dan olahraga hanya memiliki satu program yaitu program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dan memiliki tujuh kegiatan. Kegiatan-kegiatan dan jumlah anggarannya tertera di bawah ini.

Tabel 3.3 Kegiatan dari Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Kegiatan	Jumlah (Rp)
Pembinaan olah raga usia dini	15.000.000
Olimpiade olah raga SD	15.000.000
Olimpiade olah raga SDLB/PLB	10.000.000
Olimpiade olah raga SMP	15.000.000
Pengiriman Kontingen POR SD Ketingkat Propinsi	20.000.000
Penyelenggaraan POPDA IV Tingkat Kabupaten	45.000.000
Penyelenggaraan Kejuaraan Sepak Takrow antar Pelajar	10.000.000
Total	130.000.000

Sumber: diolah dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Lamongan 2010

Kerangka penjabaran rencana kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dalam bentuk matrik yang menguraikan secara ringkas visi, misi, tujuan, sasaran dan cara pencapaian tujuan serta sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2010 beserta estimasi biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut akan diberikan di lampiran 4.

BAB 4

ANALISIS BIAYA SATUAN LAYANAN

Pada bagian ini akan dilakukan analisis biaya satuan layanan pada SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Analisis dilakukan terhadap dokumen-dokumen terkait Anggaran Belanja SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan tahun 2010 yang penulis dapatkan. Analisis biaya satuan lamongan ini akan menggunakan dan menggabungkan teknik Akuntansi Biaya yang diuraikan oleh Deddi Nordiawan (2009) dan Alokasi Departemen Penunjang ke Departemen Produksi.

4.1 Menentukan Target Capaian Kinerja SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Dengan melihat visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, penulis menyimpulkan bahwa target capaian kinerja SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan adalah sebagaimana berikut.

- Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini
- Pelayanan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
- Pelayanan Pendidikan Menengah
- Pelayanan Pendidikan Non Formal
- Pelayanan Pendidikan Luar Sekolah
- Pelayanan Pendidikan Perguruan Tinggi
- Pelayanan Olahraga

4.2 Melakukan Reklasifikasi Belanja Program dan Kegiatan

Data awal terkait Belanja Program
Belanja Pegawai PNS Fungsional
Belanja Pegawai PNS Non
Fungsional

dan kegiatan adalah sebagaimana berikut:
Rp.305.106.776.388
Rp. 21.229.916.879

Tabel 4.1 Belanja Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

No	Program Urusan Pendidikan	Kegiatan	Total
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.384.000
2	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	474.438.000
3	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	188.100.000
4	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	4.000.000
5	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	24.000.000
6	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Alat Tulis Kantor	784.110.000
7	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	129.000.000
8	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	43.500.000
9	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.050.000
10	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000
11	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Makanan dan Minuman (Rapat)	18.500.000
12	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	50.000.000
13	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan	2.029.633.000
14	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	283.500.000
15	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	18.000.000
16	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	30.000.000
17	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	30.000.000
18	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000

(Sambungan Tabel 4.1)

19	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	5.000.000
20	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5.000.000
21	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Forum SKPD	5.000.000
22	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	30.000.000
23	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Penilaian guru berprestasi TK/SD	15.000.000
24	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Penilaian pengawas TK/SD berprestasi	10.000.000
25	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Penilaian Kepala TK/SD Berprestasi	10.000.000
26	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Entry dan update data Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) SD, MI, SMP/MTs, SMA, SMK dan MA Negeri/Swasta	20.890.000
27	Pendidikan Anak Usia Dini	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	10.000.000
28	Pendidikan Anak Usia Dini	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	365.500.000
29	Pendidikan Anak Usia Dini	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	1.846.600.000
30	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	300.000.000
31	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	1.045.000.000
32	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	2.470.250.000
33	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Pembinaan SMP Terbuka	10.000.000
34	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren	25.000.000
35	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	30.000.000
36	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	50.000.000
37	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa	35.000.000
38	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	20.000.000

Universitas Indonesia

39	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Penyelenggaraan akreditasi SMP	20.000.000
40	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Penyelenggaraan Ujian Sekolah (US) SD	72.000.000
41	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Penyelenggaraan Ujian tingkat SMP	205.000.000
42	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Pemberian reward kepada siswa berprestasi melalui berbagai kegiatan lomba	35.000.000
43	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Penyediaan buku induk, raport dan leger untuk SMP	75.000.000
44	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Penyelenggaraan Sekolah Berbasis Internasional (SBI) Tingkat SMP	300.000.000
45	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Pengiriman Tim Vestifal Budaya pelajar	50.000.000
46	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Penyelenggaraan UASBN SD/MI	150.000.000
47	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Pembinaan SD Terpencil dengan Program Guru Kunjung	10.000.000
48	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Penilaian Kinerja Guru SD	15.000.000
49	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Fasilitasi Penyaluran Bantuan kepada Lembaga SD/SMP Negeri/Swasta yang mendapat dana DAK Bidang Pendidikan	1.268.370.400
50	Pendidikan Menengah	Pembangunan Gedung Sekolah	75.000.000
51	Pendidikan Menengah	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	175.000.000
52	Pendidikan Menengah	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	152.250.000
53	Pendidikan Menengah	Penyelenggaraan Paket C setara SMA	125.000.000
54	Pendidikan Menengah	Pengembangan bahasa Mandarin	30.000.000
55	Pendidikan Menengah	Penyelenggaraan Olimpiade Sains SMA/SMK	26.000.000
56	Pendidikan Menengah	Pengadaan Buku Induk, Raport Leger untuk SMA/SMK Negeri	40.000.000
57	Pendidikan Menengah	Penyelenggaraan Ujian SMA/SMK	150.000.000
58	Pendidikan Menengah	Penyelenggaraan lomba siswa berprestasi tingkat SMA/SMK	20.000.000
59	Pendidikan Menengah	Fasilitasi Penyediaan Bea Siswa Bagi Keluarga Tidak Mampu	20.000.000
60	Pendidikan Menengah	Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun.	20.000.000
61	Pendidikan Menengah	Penyelenggaraan Sekolah Berbasis Internasional (SBI) Tingkat SMA	300.000.000

(Sambungan Tabel 4.1)

62	Pendidikan Perguruan Tinggi	Fasilitas Penyediaan Bea Siswa Bagi Mahasiswa Keluarga Tidak Mampu	10.000.000
63	Pendidikan Non Formal	Pelatihan Tutor Keaksaraan Fungsional (KF)	20.000.000
64	Pendidikan Non Formal	Penyelenggaraan program keaksaraan fungsional dalam bentuk KBU	50.000.000
65	Pendidikan Luar Sekolah	Penyediaan makanan dan minuman harian	65.000.000
66	Pengembangan Budaya Baca dan Minat Perpustakaan	Pengembangan minat dan budaya baca.	10.000.000
67	Pengembangan Budaya Baca dan Minat Perpustakaan	Peringatan Hari Aksara International (HAI)	15.000.000
68	Manajemen Pelayanan Pendidikan	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	30.000.000
69	Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pameran Pendidikan	40.000.000
70	Manajemen Pelayanan Pendidikan	Peringatan HARDIKNAS	30.000.000

Adapun Program dan Kegiatan untuk Olahraga kita satukan menjadi Belanja Olahraga dengan total belanja terkait langsungnya adalah : Rp. 130.000.000,-

Kemudian sebagai langkah awal dilakukan reklasifikasi & pengelompokkan belanja atas program dan kegiatan yang ada berdasarkan target capaian kinerja SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Klasifikasinya adalah:

1. Belanja Langsung Terkait Capaian Kinerja
2. Belanja Tidak Langsung Terkait Capaian Kinerja
3. Belanja Tidak Terkait Kinerja

Belanja Terkait Kinerja Secara Langsung	Nomor Kegiatan	Belanja Kegiatan	Gaji Pegawai Fungsional
1. Pendidikan Anak Usia Dini	23-25, 27-29	2,212,803,774	3,096,217,415.58
2. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	23-25, 30-49	6,229,916,626	268,182,656,411.30
3. Pendidikan Menengah	50-61	1,133,250,000	33,827,902,561.12
4. Pendidikan Perguruan Tinggi	62	10,000,000	
5. Pendidikan Non Formal	63-64	70,000,000	
6. Pendidikan Luar Sekolah	65	65,000,000	
7. Olahraga		130.000.000	
Belanja Terkait Kinerja Secara Tidak Langsung			
8. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	22 & 26	50,890,000	
9. Pengembangan Budaya Baca dan Minat Perpustakaan	66-67	25,000,000	
10. Manajemen Pelayanan Pendidikan	68-70	70,000,000	
Belanja Tidak Terkait Kinerja			
11. Pelayanan Administrasi Perkantoran	1--13	3,838,715,000	
12. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	14-17	361,500,000	
13. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	18-21	20,000,000	
B Gaji Pegawai Non-Fungsional		21,229,916,879	

Nilai yang terdapat pada Gaji Fungsional didapat dari penelusuran langsung dari data Gaji & Tunjangan PNS yang terdapat pada lampiran 2. Dari Lampiran 2 kita ketahui bahwa Gaji Fungsional beserta tambahannya adalah senilai:

- a. Guru TK Negeri : Rp. 2,953,565,430
- b. Guru SD Negeri : Rp. 185,900,318,391
- c. Guru SMP : Rp. 69,926,361,905
- d. Guru SMA : Rp. 32,269,350,037
- e. Guru DPK : Rp. 14,057,180,625

Untuk program wajib pendidikan dasar 9 tahun, nilainya didapat dari menjumlahkan gaji guru SDN dengan SMP. Sebelumnya dilakukan alokasi dari kelompok gaji guru DPK (diperbantukan) ke kelompok gaji guru yang lain. Dasar Alokasi (*cost driver*) adalah adalah Gaji Guru masing-masing program kegiatan. Semakin besar gaji guru artinya semakin banyak guru yang ada dan semakin besar mendapatkan alokasi dari guru yang diperbantukan dikelompok guru tersebut.

Ini dilakukan karena penulis tidak mengetahui berapa alokasi guru gaji DPK untuk setiap program pendidikan. Penulis mengalokasikan ke kelompok guru TKN, SDN, SMP, dan SMA. Penulis tidak mengalokasikan ke program pendidikan non-formal, pendidikan luar sekolah, pendidikan perguruan tinggi dan olahraga karena setelah menganalisis di dalam program-program tersebut, kegiataannya tidak terkait dengan pengajaran yang membutuhkan guru. Kegiatan yang dilakukan sifatnya bantuan dalam bentuk non-guru agar program itu bisa berjalan dengan baik. Pendidikan non-formal dan pendidikan luar sekolah dilakukan oleh pihak masyarakat sendiri, Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan memberikan dukungan dalam bentuk bantuan keuangan.

Jumlah Alokasi Guru DPK = Rp. 14,057,180,625

a. Guru TK Negeri : Rp. $\frac{2,953,565,430}{14,057,180,625} \times 14,057,180,625 = 142,651,986$
291,049,595,763

b. Guru SD Negeri : Rp. $\frac{185,900,318,391}{14,057,180,625} \times 14,057,180,625 = 8,978,656,531$
291,049,595,763

c. Guru SMP : Rp. $\frac{69,926,361,905}{14,057,180,625} \times 14,057,180,625 = 3,377,319,584$
291,049,595,763

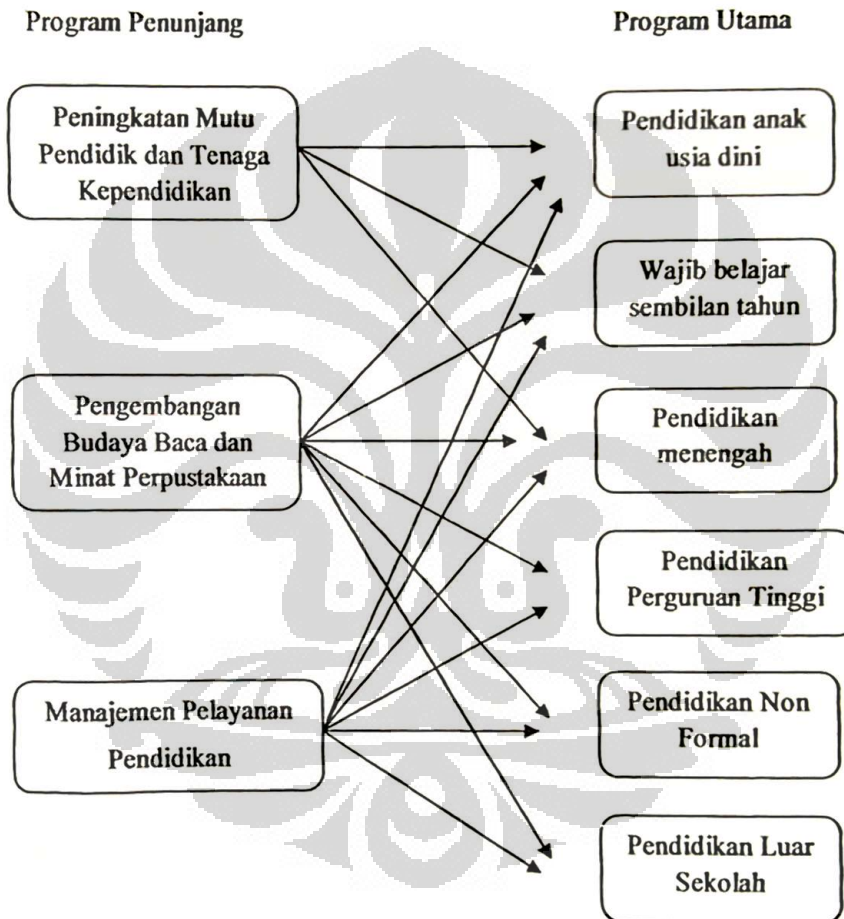
d. Guru SMA : Rp. $\frac{32,269,350,037}{14,057,180,625} \times 14,057,180,625 = 1,558,552,524$
291,049,595,763

Guru	Gaji & Tunjangan Awal	Alokasi TKN	Total
TKN	2,953,565,430	142,651,986	3,096,217,416
SD	185,900,318,391	8,978,656,531	194,878,974,922
SMP	69,926,361,905	3,377,319,584	73,303,681,489
SMA	32,269,350,037	1,558,552,524	33,827,902,561

Kemudian dimasukkan kedalam program terkait capaian kinerja

Guru	Gaji & Tunjangan Awal	Alokasi TKN	Total
Pendidikan Anak Usia Dini	2,953,565,430	142,651,986	3,096,217,416
Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	255,826,680,296	12,355,976,115	268,182,656,411
Pendidikan Menengah	32,269,350,037	1,558,552,524	33,827,902,561

Untuk Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dialokasikan kepada semua program dengan dasar alokasi adalah nilai jumlah belanja ditambah dengan komponen gaji guru. Ini penulis tentukan karena program manajemen pelayanan pendidikan ini akan dinikmati oleh semua program terkait capaian kinerja.



Gambar 4.1 Alokasi Belanja Tidak Langsung

4.3 Alokasi Belanja Tidak Langsung ke Belanja Langsung

Terdapat tiga program yang menjadi belanja tidak langsung yang harus dialokasikan ke belanja langsung. Program itu adalah :

1. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
2. Pengembangan Budaya Baca dan Minat Perpustakaan
3. Manajemen Pelayanan Pendidikan

Dengan melakukan analisis kegiatan dari masing-masing program diatas, alokasi diberikan kepada 6 program terkait capaian kinerja selain program olahraga. Program olahraga tidak relevan mendapatkan alokasi belanja tidak langsung tersebut diatas karena program diatas lebih tepat dialokasikan kepada program yang terkait dengan pendidikan bukan olahraga. Metode alokasi belanja tidak langsung ini adalah dengan metode langsung (*direct method*) yaitu langsung memberikan biaya dari program penunjang kepada program utama tanpa memberikan biaya diantara program penunjang. Inipun penulis pilih karena tidak menemukan adanya “penggunaan” diantara program penunjang.

Untuk program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan hanya dialokasikan kepada program pendidikan anak usia dini, program wajib belajar sembilan tahun dan program pendidikan menengah. Program-program yang lain tidak mendapatkan alokasi karena tidak memiliki komponen pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu guru, pada programnya. Dasarnya adalah jumlah gaji guru pada komponen program tersebut.

Untuk Program Pengembangan Budaya Baca dan Minat Perpustakaan dialokasikan kepada semua program dengan dasar alokasi adalah nilai jumlah belanja ditambah dengan komponen gaji guru. Ini penulis tentukan karena program pengembangan budaya baca dan minat perpustakaan ini akan dinikmati oleh semua program terkait capaian kinerja.

4.3.1 Alokasi Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jumlah Belanja Rp. 50,890,000. Dasar alokasi adalah jumlah belanja gaji guru.

Pendidikan anak usia dini	: $\frac{3,096,217,416}{305,106,776,388} \times 50,890,000 = \text{Rp. } 516,430.69$
Wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun	: $\frac{268,182,656,411}{305,106,776,388} \times 50,890,000 = \text{Rp. } 44,731,275.87$
Pendidikan menengah	: $\frac{33,827,902,561}{305,106,776,388} \times 50,890,000 = \text{Rp. } 5,642,293.43$

4.3.2 Alokasi Program Pengembangan Budaya Baca dan Minat Perpustakaan

Jumlah Belanja Rp. 25,000,000. Dasar alokasi adalah jumlah belanja program ditambah unsur gaji guru.

Pendidikan anak usia dini	: $\frac{5,309,021,189.53}{314,827,746,788} \times 25,000,000 = \text{Rp. } 421,581.42$
Wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun	: $\frac{274,412,573,037.35}{314,827,746,788} \times 25,000,000 = \text{Rp. } 21,790,691.56$
Pendidikan menengah	: $\frac{34,961,152,561.12}{314,827,746,788} \times 25,000,000 = \text{Rp. } 2,776,212.78$
Pendidikan perguruan tinggi	: $\frac{10,000,000}{314,827,746,788} \times 25,000,000 = \text{Rp. } 794.09$
Pendidikan non-formal	: $\frac{70,000,000}{314,827,746,788} \times 25,000,000 = \text{Rp. } 5,558.60$
Pendidikan luar sekolah	: $\frac{65,000,000}{314,827,746,788} \times 25,000,000 = \text{Rp. } 5,161.55$

4.3.3 Alokasi Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Jumlah Belanja Rp. 70,000,000. Dasar alokasi adalah jumlah belanja program ditambah unsur gaji guru.

Pendidikan anak usia dini	:	$\frac{5,309,021,189.53}{314,827,746,788} \times 70,000,000 = \text{Rp. } 1,180,427.99$
Wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun	:	$\frac{274,412,573,037.35}{314,827,746,788} \times 70,000,000 = \text{Rp. } 61,013,936.38$
Pendidikan menengah	:	$\frac{34,961,152,561.12}{314,827,746,788} \times 70,000,000 = \text{Rp. } 7,773,395.78$
Pendidikan perguruan tinggi	:	$\frac{10,000,000}{314,827,746,788} \times 70,000,000 = \text{Rp. } 2,223.44$
Pendidikan non-formal	:	$\frac{70,000,000}{314,827,746,788} \times 70,000,000 = \text{Rp. } 15,564.07$
Pendidikan luar sekolah	:	$\frac{65,000,000}{314,827,746,788} \times 70,000,000 = \text{Rp. } 14,452.35$

Biaya satuan program-program SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan yang merupakan capaian kinerja setelah mendapat alokasi-alokasi diatas adalah sebagai berikut:

Program	Total sebelum Alokasi	Alokasi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Alokasi Program Pengembangan Budaya Baca dan Minat Perpustakaan	Alokasi Manajemen Pelayanan Pendidikan	Total Biaya
Pendidikan Anak Usia Dini	5,309,021,189.53	516,430.69	421,581.42	1,180,427.99	5,311,139,629.6
Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	274,412,573,037.35	44,731,275.87	21,790,691.56	61,013,936.38	274,540,108,941.1
Pendidikan Menengah	34,961,152,561.12	5,642,293.43	2,776,212.78	7,773,395.78	34,977,344,463.1
Pendidikan Perguruan Tinggi	10,000,000.00		794.09	2,223.44	10,003,017.5

Pendidikan Non Formal	70,000,000.00		5,558.60	15,564.07	70,021,122.6
Pendidikan Luar Sekolah	65,000,000.00		5,161.55	14,452.35	65,019,613.9
Olahraga	130,000,000.00				130,000,000.0

4.3.4 Unit Cost Pelayanan Per Siswa Ajar

Untuk mendapatkan *unit cost* pelayanan per siswa ajar tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Program	Total Biaya	Jumlah siswa ¹⁸	Alokasi Biaya per siswa
Pendidikan Anak Usia Dini	5,311,139,629.64	18.175	292,222.26
Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	274,540,108,941.16	183.844	1,493,331.90
Pendidikan Menengah	34,977,344,463.12	49.895	701,019.03

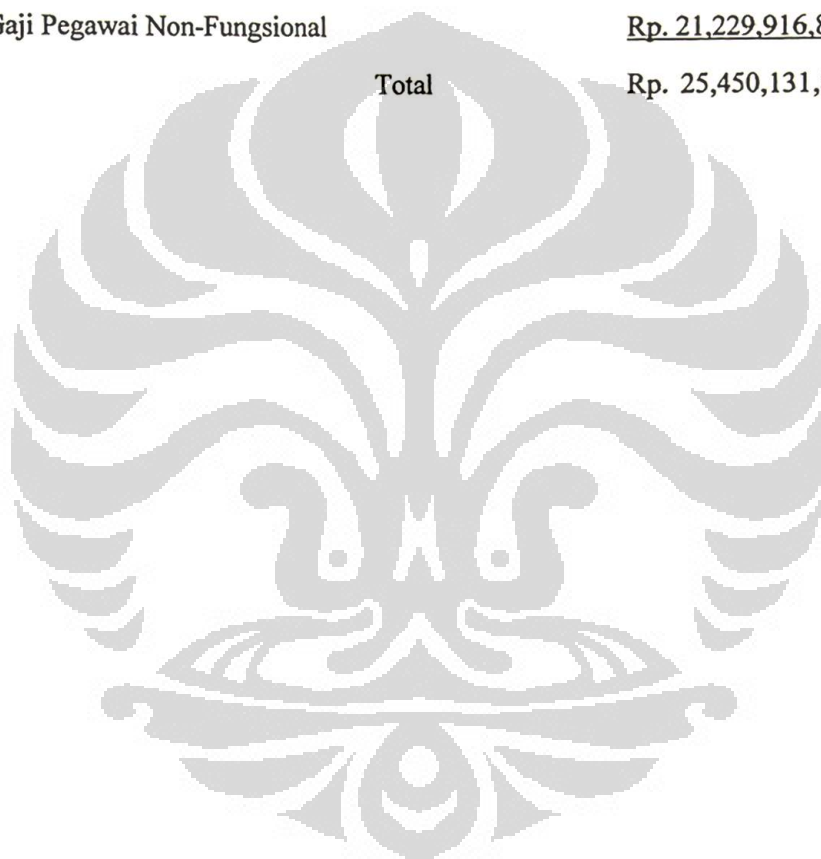
4.4 Belanja Tidak Terkait Capaian Kinerja

Terdapat program-program yang menurut penulis tidak terkait dengan capaian kinerja. Menurut penulis belanja-belanja yang terkait program-program tersebut tidak relevan dalam pencapaian sasaran SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Artinya bila ingin meningkatkan sasaran capaian kinerja, misalnya naiknya jumlah anak sekolah yang mengikuti pendidikan menengah, tidaklah tepat bila kelompok belanja ini ditambah "nilai belanjanya". Penambahan "nilai belanja" pada program-program terkait capaian kinerja yang akan membuat target sasaran itu akan tercapai. Oleh karena itu, belanja tersebut tidak dialokasikan ke program-program terkait capaian kinerja.

¹⁸ Data jumlah siswa ajar tahun 2010 yang didapat dari Dinas Pendidikan Lamongan adalah PAUD : 18.175, SD : 122.061, SMP : 61.783, SMA: 49.895. Data siswa program wajib belajar 9 tahun didapat dari penjumlahan siswa SD + SMP.

Program-program itu adalah :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 3,838,715,000
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 361,500,000
3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Rp. 20.000.000
4. Gaji Pegawai Non-Fungsional	<u>Rp. 21,229,916,879</u>
Total	Rp. 25,450,131,879.-



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Perhitungan analisis biaya memerlukan teknik dan pemahaman akuntansi biaya yang cermat dan didukung dengan data dan informasi yang akurat. Dalam analisis biaya yang terkait dengan unit pelayanan dari SKPD Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Lamongan, perhitungan analisis biaya satuan unit pelayanan harus dilakukan dengan mereklasifikasi terlebih dahulu klasifikasi belanja terkait dengan komponen belanja langsung dan tidak langsung. Kita tidak bisa melakukan perhitungan analisis biaya dengan menggunakan dasar klasifikasi belanja langsung dan tidak langsung yang saat ini diterapkan.
2. Dari hasil perhitungan analisis biaya satuan pelayanan SKPD Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Lamongan terkait dengan capaian kinerja didapat sebagai berikut.

1) Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini	Rp. 5,311,139,629.64
2) Pelayanan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Rp. 274,540,108,941.16
3) Pelayanan Pendidikan Menengah	Rp. 34,977,344,463.12
4) Pelayanan Pendidikan Non Formal	Rp. 10,003,017.52
5) Pelayanan Pendidikan Luar Sekolah	Rp. 70,021,122.66
6) Pelayanan Pendidikan Perguruan Tinggi	Rp. 65,019,613.90
7) Pelayanan Olahraga	<u>Rp. 130,000,000.00</u>
Total	Rp. 315,103,636,788.00

3. Adapun *unit cost* siswa ajar untuk tahun 2010 adalah sebagai berikut:

- Siswa Pendidikan Anak Usia Dini	(TK)	= Rp.	292,222.26
- Siswa Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (SD+SMP)		= Rp.	1,493,331.90
- Siswa Pendidikan Menengah	(SMA)	= Rp.	701,019.03

4. Terdapat Biaya tidak terkait kinerja senilai Rp 25,450,131,879 terdiri dari

1) Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 3,838,715,000
2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 361,500,000
3) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Rp. 20.000.000
4) Gaji Pegawai Non-Fungsional	Rp. 21,229,916,879

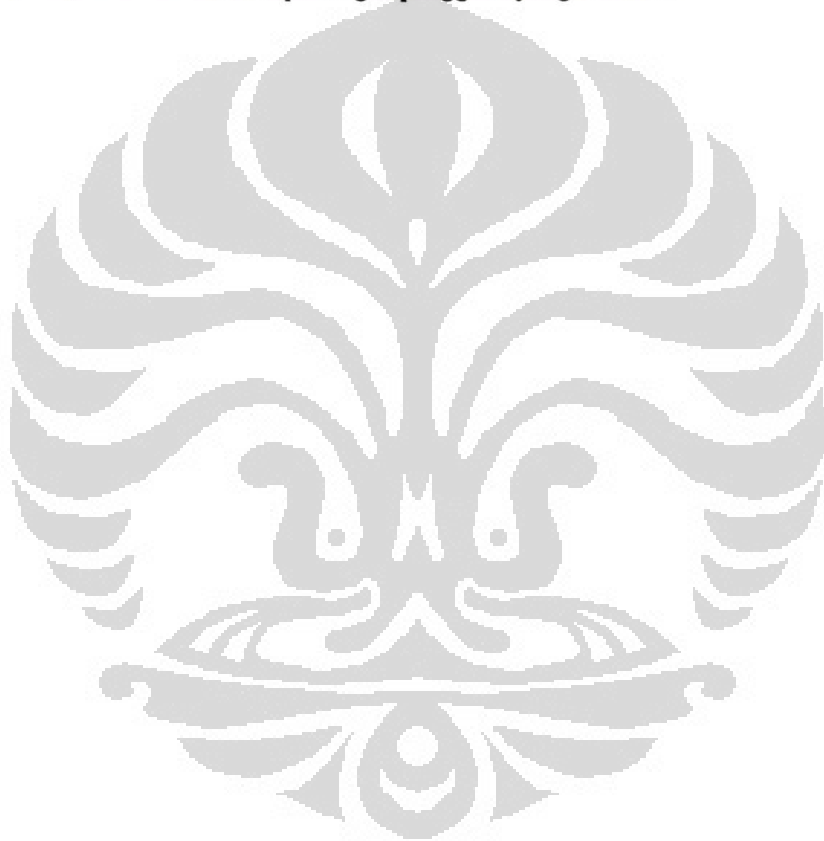
5. Perhitungan analisis biaya ini diantaranya bisa menjelaskan dan mengurangi mispersepsi di kalangan pembaca dan pengguna APBD yang hanya melihat data-data yang tertera di APBD saja. Dengan perhitungan ini didapatkan bahwa belanja biaya satuan pelayanan SKPD Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Lamongan terkait dengan capaian kinerja adalah 92,52 % dari total anggaran yang didapatnya. Hanya 7, 48% belanja yang tidak terkait dengan capaian kinerja.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis dapat menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan perhitungan analisis biaya satuan pelayanan dalam pembelanjaan publik. Ini terkait dengan kebutuhan penilaian kinerja dan menjelaskan dan mengurangi mispersepsi pembaca dan pengguna APBD sehingga dapat memudahkan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan publik oleh pihak-pihak terkait.

2. Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja yang membagi kelompok belanja menjadi langsung dan tidak langsung sebaiknya direklasifikasi lagi agar memudahkan dalam perhitungan dan analisis satuan biaya pelayanan.
3. Tersedianya format pelaporan untuk tujuan yang berbeda. Banyaknya pihak yang berkepentingan membuat harus adanya format laporan khusus masing-masing. Format ini didasarkan dari data-data format APBD & Laporan Keuangan yang ada. Jadi datanya sama tapi dapat diolah untuk kepentingan pengguna yang berbeda.



DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, 2006, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Dian K.W.,2010, *Analisis Biaya Satuan Layanan Perpustakaan Umum Daerah Studi Kasus : Kantor Perpustakaan dan Arsip Jakarta Pusat*, Tesis S2, Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik. Universitas Indonesia. Depok.
- Hansen & Mowen, 2003, *Management Accounting, ed. 4*, Prentice Hall, New York.
- Hongren dkk, 2006, terjemah *Akuntansi Suatu Pengantar*, Salemba Empat, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2007, *Standar Akuntansi Keuangan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Mahmudi, 2009, *Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Nordiawan, Deddi, *Klasifikasi Belanja dan Perhitungan Biaya Aktivitas*, Jakarta. 1 Juni 2009.
- *Unit Costing*, Jakarta, 2009.
- Sri Eko Utami, 2008, *Analisis Ketaatan Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah*, Jurusan Akuntansi. Program Studi Akuntansi D3. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Sucipto, *Penerapan Akuntansi Manajemen dalam Pengambilan Keputusan*, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Syafrida Fitrie, 2008, *Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Permendagri 13 Tahun 2006 pada Pemerintah Kota Binjai*, Tesis S2, Program Studi Pembangunan Sekolah Pasca Sarjana. Universitas Sumatra Utara. Medan
- Yuwono, Sony dkk, 2008, *Memahami APBD dan Permasalahannya*, Bayu Media Publishing, Malang.

Republik Indonesia. 2003, Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara, Jakarta.

Republik Indonesia, 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Jakarta.

Republik Indonesia, 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.

Republik Indonesia, 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.

Pemerintah Kabupaten Lamongan, 2010, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Lamongan

www.lamongan.go.id

www.depdagri.go.id



Universitas Indonesia



Lampiran 1 : Ringkasan APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2010
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIS DAERAH
 Jalan KH. Achmad Dahlan Nomor 1 Telepon (0322) 321012
 L A M O N G A N

PUBLIKASI DOKUMEN PUBLIK

Nomor : 050 /077 / 413.202 / 2010

RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2010

Sebagai komitmen pemerintah daerah Kabupaten Lamongan dalam rangka Tranparansi penyelenggaraan pemerintahan maka bersama ini kami sajikan Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 13 Tahun 2009 Tentang APBD Kabupaten Lamongan TA. 2010 dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lamongan TA. 2010 Tanggal 31 Desember 2009 sebagai berikut :

A. RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2010.

NO.	URAIAN	APBD TA. 2010 (Rp.)
4.	PENDAPATAN DAERAH	
4. 1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	94.066.054.977,00
4 1.1	Hasil Pajak Daerah	16.177.527.500,00
4 1.2	Hasil Restribusi Daerah	11.920.612.500,00
4 1.3	Hasil Pengelolaan daerah yang dipisahkan	13.087.924.350,00
4 1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	52.879.990.627,00
4. 2.	DANA PERIMBANGAN	740.113.404.600,00
4 2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	73.448.104.600,00
4 2.2	Dana Alokasi Umum	606.700.000.000,00
4 2.3	Dana Alokasi Khusus	59.965.300.000,00
4. 3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	47.801.865.950,00
4 3.3	Dana bagi Hasil Pajak dari Propinsi	40.118.808.550,00
4 3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.646.224.000,00
4 3.6	Dana Bgi Hasil Restribusi dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	36.833.400,00
	JUMLAH PENDAPATAN	881.981.325.527,00
5.	BELANJA DAERAH	
5. 1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	698.813.112.363,00
5 1.1	Belanja Pegawai	527.801.392.763,00
5 1.2	Belanja Bunga	29.271.000,00
5 1.3	Belanja Subsidi	375.000.000,00
5 1.4	Belanja Hibah	91.377.748.600,00
5 1.5	Belanja Bantuan Sosial	16.829.000.000,00
5 1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	2.231.900.000,00
5 1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	55.053.800.000,00
5 1.8	Belanja Tidak Terduga	5.115.000.000,00
5. 2.	BELANJA LANGSUNG	243.226.459.657,00
5 2.1	Belanja Pegawai	30.309.568.197,00

Lampiran 1 : Ringkasan APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2010 (lanjutan)

5 2.2	Belanja Barang dan Jasa	111.452.988.560,00
5 2.3	Belanja Modal	101.463.902.900,00
	JUMLAH BELANJA	942.039.572.020,00
	(DEFISIT)	(60.058.246.493,00)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	
6 1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	.
6 1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya.	19.190.000.000,00
6 1.6	Penerimaan Piutang Daerah.	64.612.711.600,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	83.802.711.600,00
6 2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	
6 2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	23.700.000.000,00
6 2.3	Pembayaran Pokok Utang	41.583.200,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	23.741.583.200,00
	PEMBIAYAAN NETTO	60.061.128.400,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA).	2.881.907,00

B. RINGKASAN PENJABARAN APBD KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2010 MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI.

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1.	URUSAN WAJIB	880.682.025.527,00	685.955.179.563,00	224.596.461.997,00	910.551.641.360,00
1.01	Pendidikan	0,00	354.784.605.950,00	14.247.075.400,00	369.031.681.350,00
1.01.01	Dinas Pendidikan	0,00	354.784.605.950,00	14.247.075.400,00	369.031.681.350,00
1.02	Kesehatan				
1.02.01	Dinas Kesehatan	2.236.558.500,00	41.046.198.000,00	22.969.716.450,00	64.015.914.450,00
1.02.02	RSUD Dr. SOEGIRI	30.398.240.627,00	10.882.287.000,00	32.540.740.627,00	43.423.027.627,00
1.03	Pekerjaan Umum				
1.03.01	Dinas PU Bina Marga	147.750.000,00	3.451.423.000,00	19.020.305.000,00	22.471.728.000,00
1.03.02	Dinas PU Pengairan	195.550.000,00	4.561.350.000,00	7.404.726.500,00	11.966.076.500,00
1.03.03	Dinas PU Cipta Karya	111.500.000,00	3.461.063.000,00	42.270.736.240,00	45.731.799.240,00
1.06	Perencanaan Pembangunan	0,00	2.691.066.000,00	4.079.933.600,00	6.770.999.600,00
1.06.01	Bappeda	0,00	2.095.033.000,00	3.477.033.600,00	5.572.066.600,00
1.06.02	Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah.	0,00	596.033.000,00	602.900.000,00	1.198.933.000,00
1.07	Perhubungan	4.900.185.000,00	3.595.545.000,00	1.945.500.000,00	5.541.045.000,00
1.07.01	Dinas Perhubungan	4.900.185.000,00	3.595.545.000,00	1.945.500.000,00	5.541.045.000,00
1.08	Lingkungan Hidup	0,00	966.259.000,00	1.612.660.000,00	2.578.919.000,00
1.08.01	Badan Lingkungan Hidup	0,00	966.259.000,00	1.612.660.000,00	2.578.919.000,00
1.10	Kependudukan dan Catatan Sipil	636.190.000,00	1.652.076.000,00	1.187.725.000,00	2.839.801.000,00
1.10.01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.	636.190.000,00	1.652.076.000,00	1.187.725.000,00	2.839.801.000,00
1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	8.900.430.000,00	2.626.816.400,00	11.527.246.400,00
1.11.01	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.	0,00	8.900.430.000,00	2.626.816.400,00	11.527.246.400,00

Lampiran 1 : Ringkasan APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2010 (lanjutan)

1.14	Tenaga Kerja	0,00	2.250.636.000,00	1.995.239.500,00	4.245.875.500,00
1.14.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	2.250.636.000,00	1.995.239.500,00	4.245.875.500,00
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1.15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.185.000.000,00	2.294.061.000,00	2.479.290.000,00	4.773.351.000,00
1.15.01	Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan.	3.185.000.000,00	2.294.061.000,00	2.479.290.000,00	4.773.351.000,00
1.16	Penanaman Modal	0,00	843.240.000,00	276.296.000,00	1.119.536.000,00
1.16.01	Kantor Penanaman Modal	0,00	843.240.000,00	276.296.000,00	1.119.536.000,00
1.17	Kebudayaan	704.020.000,00	1.905.447.000,00	730.183.300,00	2.635.630.300,00
1.17.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.	704.020.000,00	1.905.447.000,00	730.183.300,00	2.635.630.300,00
1.18	Kepemudaan dan Olahraga	35.000.000,00	1.476.656.000,00	1.148.012.500,00	2.624.668.500,00
1.18.01	Dinas Pemuda dan Olahraga.	35.000.000,00	1.476.656.000,00	1.148.012.500,00	2.624.668.500,00
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	0,00	3.875.405.000,00	2.958.855.800,00	6.834.260.800,00
1.19.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	0,00	2.011.489.000,00	1.655.412.000,00	3.666.901.000,00
1.19.02	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	1.863.916.000,00	1.303.443.800,00	3.167.359.800,00
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	838.062.031.400,00	232.813.565.413,00	60.811.113.080,00	293.624.678.493,00
1.20.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	7.919.971.080,00	0,00	7.919.971.080,00
1.20.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	564.475.000,00	0,00	564.475.000,00
1.20.03	Sekretariat Daerah	968.269.000,00	8.516.330.000,00	29.407.204.150,00	37.923.534.150,00
1.20.04	Sekretariat DPRD	0,00	1.629.235.000,00	9.277.870.430,00	10.907.105.430,00
1.20.05	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.	835.709.462.400,00	180.093.881.333,00	8.139.871.000,00	188.233.752.333,00
1.20.06	Inspektorat	0,00	1.574.297.000,00	2.298.890.000,00	3.873.187.000,00
1.20.08	Badan Kepegawaian Daerah	0,00	2.026.405.000,00	2.289.910.000,00	4.316.315.000,00
1.20.09	Kantor Perijinan	1.384.300.000,00	868.653.000,00	421.868.500,00	1.290.521.500,00
1.20.10	Kecamatan Lamongan	0,00	4.422.189.000,00	1.867.141.000,00	6.289.330.000,00
1.20.11	Kecamatan Babat	0,00	2.199.858.000,00	801.846.000,00	3.001.704.000,00
1.20.12	Kecamatan Paciran	0,00	1.367.197.000,00	732.991.000,00	2.100.188.000,00
1.20.13	Kecamatan Brondong	0,00	1.025.473.000,00	539.871.000,00	1.565.344.000,00
1.20.14	Kecamatan Turi	0,00	917.909.000,00	262.778.000,00	1.180.687.000,00
1.20.15	Kecamatan Pucuk	0,00	873.390.000,00	213.478.000,00	1.086.868.000,00
1.20.16	Kecamatan Sukodadi	0,00	1.262.832.000,00	218.120.000,00	1.480.952.000,00
1.20.17	Kecamatan Tikung	0,00	986.932.000,00	210.953.000,00	1.197.885.000,00
1.20.18	Kecamatan Deket	0,00	1.140.568.000,00	217.726.000,00	1.358.294.000,00
1.20.19	Kecamatan Kall Tengah	0,00	974.297.000,00	217.778.000,00	1.192.075.000,00
1.20.20	Kecamatan Kembangbahu	0,00	923.955.000,00	210.953.000,00	1.134.908.000,00
1.20.21	Kecamatan Mantup	0,00	1.070.180.000,00	229.175.000,00	1.299.355.000,00
1.20.22	Kecamatan Modo	0,00	808.329.000,00	215.953.000,00	1.024.282.000,00

Lampiran 1 : Ringkasan APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2010 (lanjutan)

1.20.23	Kecamatan Bluluk	0,00	855.102.000,00	217.403.000,00	1.072.505.000,00
1.20.24	Kecamatan Karangbinangun	0,00	908.848.000,00	217.726.000,00	1.126.574.000,00
1.20.25	Kecamatan Glagah	0,00	1.085.001.000,00	229.105.000,00	1.314.106.000,00
1.20.26	Kecamatan Ngimbang	0,00	1.060.421.000,00	216.803.000,00	1.277.224.000,00
1.20.27	Kecamatan Sugio	0,00	1.198.684.000,00	237.819.000,00	1.436.503.000,00
1.20.28	Kecamatan Karanggeneng	0,00	704.014.000,00	220.250.000,00	924.264.000,00
1.20.29	Kecamatan Sambeng	0,00	671.251.000,00	222.726.000,00	893.977.000,00
1.20.30	Kecamatan Kedungpring	0,00	980.749.000,00	210.953.000,00	1.191.702.000,00
1.20.31	Kecamatan Laren	0,00	728.702.000,00	210.953.000,00	939.655.000,00
1.20.32	Kecamatan Sekaran	0,00	742.744.000,00	205.953.000,00	948.697.000,00
1.20.33	Kecamatan Sarirejo	0,00	643.417.000,00	210.953.000,00	854.370.000,00
1.20.34	Kecamatan Sukorame	0,00	663.947.000,00	214.186.000,00	878.133.000,00
1.20.35	Kecamatan Solokuro	0,00	605.435.000,00	215.953.000,00	821.388.000,00
1.20.36	Kecamatan Maduran	0,00	798.894.000,00	205.953.000,00	1.004.847.000,00
1.21	Ketahanan Pangan	70.000.000,00	453.534.000,00	406.972.250,00	860.506.250,00
1.21.01	Kantor Ketahanan Pangan	70.000.000,00	453.534.000,00	406.972.250,00	860.506.250,00
1.22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	1.840.328.000,00	1.725.957.600,00	3.566.285.600,00
1.22.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	1.840.328.000,00	1.725.957.600,00	3.566.285.600,00
1.24	Kearsipan	0,00	1.426.821.000,00	817.098.000,00	2.243.919.000,00
1.24.01	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	1.426.821.000,00	817.098.000,00	2.243.919.000,00
1.25	Komunikasi dan Informatika	0,00	783.183.000,00	1.341.508.750,00	2.124.691.750,00
1.25.01	Kantor Pengolahan Data Elektronik	0,00	783.183.000,00	1.341.508.750,00	2.124.691.750,00
2.	URUSAN PILIHAN	1.299.300.000,00	12.857.933.000,00	18.629.997.660,00	31.487.930.660,00
2.01	Pertanian	421.800.000,00	10.659.454.000,00	9.732.840.260,00	20.392.294.260,00
2.01.01	Dinas Pertanian dan Kehutanan	280.500.000,00	8.042.154.000,00	8.831.040.260,00	16.873.194.260,00
2.01.02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	141.300.000,00	2.617.300.000,00	901.800.000,00	3.519.100.000,00
2.05	Kelautan dan Perikanan	877.500.000,00	2.198.479.000,00	8.897.157.400,00	11.095.636.400,00
2.05.01	Dinas Perikanan dan Kelautan	877.500.000,00	2.198.479.000,00	8.897.157.400,00	11.095.636.400,00
	JUMLAH 1 + 2	881.981.325.527,00	698.813.112.363,00	243.226.459.657,00	942.039.572.020,00


Demikian Publikasi Dokumen Publik Ringkasan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2010 disampaikan untuk diketahui masyarakat.

Lamongan, Pebruari 2010

An. BUPATI LAMONGAN
SEKRETARIS DAERAH

F A D E L I . S H . M M .
Pembina Utama Madya
NIP. 19550716 198001 1 002

Lampiran 2. Realisasi Gaji Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2010

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN		NOMOR DPPA SKPD				
	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		1.01	1.01.01	00	00	5.1
Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2010							
Urusan Pemerintahan :	1.01	Pendidikan					
Organisasi :	1.01.01	Dinas Pendidikan					
Rincian Pembagian Struktur Belanja Pegawai Fungsional dan Non-Fungsional Satuan Kerja Perangkat Daerah							

Belanja Pegawai Fungsional

No	Kode Rekening Gaji	Uraian	SDN	DPK	SMP	SMA	TKN	TOTAL
1	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	138,824,356,934	10,104,543,900	51,086,271,420	23,586,931,440	2,235,596,800	225,837,700,494
2	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	12,331,286,515	1,006,658,170	5,204,862,373	2,327,174,381	169,336,353	21,039,317,792
3	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	-	-	(370,000)	-	286,000	(84,000)
4	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	18,483,949,000	1,676,366,000	6,515,109,000	2,807,954,000	67,070,000	29,550,448,000
5	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	1,618,990,000	67,910,000	1,071,665,900	715,099,000	227,655,000	3,701,319,900
6	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	6,747,486,120	664,776,000	3,145,454,820	1,453,501,260	170,682,300	12,181,900,500
7	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5,137,137,478	331,827,232	1,727,964,981	764,199,085	39,139,389	8,000,268,165
8	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	2,818,906	233,568	979,519	463,741	79,752	4,575,486
9	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES	2,754,293,438	204,865,755	1,036,948,892	477,077,130	43,719,836	4,516,905,051
10	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	-	-	137,475,000	136,950,000	-	274,425,000
							Total	305,106,776,388

Belanja Pegawai Non-Fungsional

No	Kode Rekening Gaji	Uraian	LOKAL	ADMINISTRASI	TOTAL
1	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	4,424,769,680	11,088,602,160	15,513,371,840
2	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	470,387,981	1,180,324,732	1,650,712,713
3	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	97,020,000	250,205,000	347,225,000
4	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	-	1,283,091,000	1,283,091,000
5	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	379,320,000	263,500,000	642,820,000
6	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	297,837,000	592,084,620	889,921,620
7	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	127,986,082	458,280,830	586,266,912
8	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	111,561	213,441	325,002
9	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES	89,848,076	226,334,716	316,182,792
10	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	-	-	-
			Total	21,229,916,879	

Pegawai	Bobot
Fungsional	93.49%
Non Fungsional	6.51%

Lampiran 3 : Daftar Program & Kegiatan Urusan Pendidikan Dinas Pendidikan PEMDA Lamongan

3.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan	Belanja Pegawai		Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Total
	PNS	Non-PNS			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat			34.384.000		34.384.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			474.438.000		474.438.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			188.100.000		188.100.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional			4.000.000		4.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		24.000.000			24.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor			784.110.000		784.110.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			129.000.000		129.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			43.500.000		43.500.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			56.050.000		56.050.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			3.000.000		3.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman (Rapat)			18.500.000		18.500.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			50.000.000		50.000.000
Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan		2.029.633.000			2.029.633.000
Total	-	2.053.633.000	1.785.082.000	-	3.838.715.000

Sumber: telah telah diolah kembali kembali dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Lamongan 2010

Lampiran 3 : Daftar Program & Kegiatan Urusan Pendidikan Dinas Pendidikan PEMDA Lamongan (lanjutan)

3.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan	Belanja Pegawai		Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Total
	PNS	Non-PNS			
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			283.500.000		283.500.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan			18.000.000		18.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			30.000.000		30.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair			30.000.000		30.000.000
Total	0	0	361.500.000	0	361.500.000

Sumber: telah diolah kembali dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Lamongan 2010

3.3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Kegiatan	Belanja Pegawai		Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Total
	PNS	Non-PNS			
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.134.000		3.866.000		5.000.000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	2.928.000	432.000	1.640.000		5.000.000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	3.402.000	648.000	950.000		5.000.000
Forum SKPD	3.960.000	360.000	680.000		5.000.000
Total	11.424.000	1.440.000	7.136.000	0	20.000.000

Sumber: telah diolah kembali dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Lamongan 2010

Lampiran 3 : Daftar Program & Kegiatan Urusan Pendidikan Dinas Pendidikan PEMDA Lamongan (lanjutan)

3.4 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kegiatan	Belanja Pegawai		Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Total
	PNS	Non-PNS			
Pelaksanaan sertifikasi pendidik	1.300.000	3.680.000	25.020.000		30.000.000
Penilaian guru berprestasi TK/SD	2.275.000	5.400.000	7.325.000		15.000.000
Penilaian pengawas TK/SD berprestasi	2.475.000	3.500.000	4.025.000		10.000.000
Penilaian Kepala TK/SD Berprestasi	2.275.000	4.250.000	3.475.000		10.000.000
Entry dan update data Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) SD, MI, SMP/MTs, SMA, SMK dan MA Negeri/Swasta	8.253.000	3.780.000	8.857.000		20.890.000
Total	16.578.000	20.610.000	48.702.000	0	85.890.000

Sumber: telah diolah kembali dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Lamongan 2010

3.5 Program Pendidikan Anak Usia Dini

Kegiatan	Belanja Pegawai		Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Total
	PNS	Non-PNS			
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa			10.000.000		10.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	10.500.000		355.000.000		365.500.000
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	9.450.000		1.837.150.000		1.846.600.000
Total	19.950.000	0	2.192.150.000	0	2.212.100.000

Sumber: telah diolah kembali dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Lamongan 2010

Lampiran 3 : Daftar Program & Kegiatan Urusan Pendidikan Dinas Pendidikan PEMDA Lamongan (lanjutan)

3.6 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Kegiatan	Belanja Pegawai		Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Total
	PNS	Non-PNS			
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa			300.000.000		300.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	13.600.000		1.031.400.000		1.045.000.000
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	13.425.000		15.575.000	2.441.250.000	2.470.250.000
Pembinaan SMP Terbuka	2.090.000		7.910.000		10.000.000
Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren	2.475.000		12.525.000	10.000.000	25.000.000
Penyelenggaraan Paket A Setara SD	1.125.000		21.775.000	7.100.000	30.000.000
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	2.340.000		36.500.000	11.160.000	50.000.000
Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa	11.090.000		23.910.000		35.000.000
Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	2.475.000	8.400.000	9.125.000		20.000.000
Penyelenggaraan akreditasi SMP	4.450.000	900.000	14.650.000		20.000.000
Penyelenggaraan Ujian Sekolah (US) SD	9.040.000		62.960.000		72.000.000
Penyelenggaraan Ujian tingkat SMP			205.000.000		205.000.000
Pemberian reward kepada siswa berprestasi melalui berbagai kegiatan lomba	20.885.000		14.115.000		35.000.000
Penyediaan buku induk, raport dan leger untuk SMP	1.905.000		73.095.000		75.000.000
Penyelenggaraan Sekolah Berbasis Internasional (SBI) Tingkat SMP	5.470.000		9.760.000	284.770.000	300.000.000
Pengiriman Tim Vestifal Budaya pelajar	9.975.000		40.025.000		50.000.000
Penyelenggaraan UASBN SD/MI	5.510.000		119.490.000	25.000.000	150.000.000
Pembinaan SD Terpencil dengan Program Guru Kunjung	2.275.000	6.000.000	1.725.000		10.000.000
Penilaian Kinerja Guru SD	2.275.000		12.725.000		15.000.000
Fasilitasi Penyaluran Bantuan kepada Lembaga SD/SMP Negeri/Swasta yang mendapat dana DAK Bidang Pendidikan	84.700.000	1.183.670.400			1.268.370.400
Total	195.105.000	1.198.970.400	2.012.265.000	2.779.280.000	6.185.620.400

Lampiran 3 : Daftar Program & Kegiatan Urusan Pendidikan Dinas Pendidikan PEMDA Lamongan (lanjutan)

3.7 Program Pendidikan Menengah

Kegiatan	Belanja Pegawai		Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Total
	PNS	Non-PNS			
Pembangunan Gedung Sekolah	1.775.000		1.225.000	72.000.000	75.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	3.900.000		171.100.000		175.000.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah				152.250.000	152.250.000
Penyelenggaraan Paket C setara SMA	1.260.000		123.740.000		125.000.000
Pengembangan bahasa Mandarin	12.030.000	10.800.000	3.370.000	3.800.000	30.000.000
Penyelenggaraan Olimpiade Sains SMA/SMK	5.745.000		20.255.000		26.000.000
Pengadaan Buku Induk, Raport Leger untuk SMA/SMK Negeri	1.425.000		38.575.000		40.000.000
Penyelenggaraan Ujian SMA/SMK			150.000.000		150.000.000
Penyelenggaraan lomba siswa berprestasi tingkat SMA/SMK	6.475.000	960.000	12.565.000		20.000.000
Fasilitasi Penyediaan Bea Siswa Bagi Keluarga Tidak Mampu	9.360.000		10.640.000		20.000.000
Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun.	4.872.000	2.016.000	13.112.000		20.000.000
Penyelenggaraan Sekolah Berbasis Internasional (SBI) Tingkat SMA	6.050.000		9.950.000	284.000.000	300.000.000
Total	52.892.000	13.776.000	554.532.000	512.050.000	1.133.250.000

Sumber: telah diolah kembali dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Lamongan 2010

3.8 Program Pendidikan Perguruan Tinggi

Kegiatan	Belanja Pegawai		Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Total
	PNS	Non-PNS			
Fasilitasi Penyediaan Bea Siswa Bagi Mahasiswa Keluarga Tidak Mampu		10.000.000			10.000.000
Total	0	10.000.000	0	0	10.000.000

Sumber: telah diolah kembali dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Lamongan 2010

Lampiran 3 : Daftar Program & Kegiatan Urusan Pendidikan Dinas Pendidikan PEMDA Lamongan (lanjutan)

3.9 Program Pendidikan Non Formal

Kegiatan	Belanja Pegawai		Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Total
	PNS	Non-PNS			
Pelatihan Tutor Keaksaraan Fungsional (KF)	2.475.000	3.500.000	14.025.000		20.000.000
Penyelenggaraan program keaksaraan fungsional dalam bentuk KBU	1.980.000		6.100.000	41.920.000	50.000.000
Total	4.455.000	3.500.000	20.125.000	41.920.000	70.000.000

Sumber: telah diolah kembali dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Lamongan 2010

3.10 Program Pendidikan Luar Sekolah

Kegiatan	Belanja Pegawai		Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Total
	PNS	Non-PNS			
Penyediaan makanan dan minuman harian			65.000.000		65.000.000
Total	0	0	65.000.000	0	65.000.000

Sumber: telah diolah kembali dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Lamongan 2010

3.11 Program Pengembangan Budaya Baca dan Minat Perpustakaan

Kegiatan	Belanja Pegawai		Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Total
	PNS	Non-PNS			
Pengembangan minat dan budaya baca.				10.000.000	10.000.000
Peringatan Hari Aksara International (HAL)	3.150.000		11.850.000		15.000.000
Total	3.150.000	0	11.850.000	10.000.000	25.000.000

Sumber: telah diolah kembali dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Lamongan 2010

Lampiran 3 : Daftar Program & Kegiatan Urusan Pendidikan Dinas Pendidikan PEMDA Lamongan (lanjutan)

3.12 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Kegiatan	Belanja Pegawai		Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Total
	PNS	Non-PNS			
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	5.315.000	1.500.000	23.185.000		30.000.000
Pameran Pendidikan	3.150.000	2.000.000	34.850.000		40.000.000
Peringatan HARDIKNAS	8.820.000	6.000.000	15.180.000		30.000.000
Total	11.970.000	8.000.000	50.030.000	0	70.000.000

Sumber: telah diolah kembali dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Lamongan 2010

Lampiran 4. Matrik Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2010

No	Urusan	RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2010							Estimasi Biaya
		Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Cara mencapai tujuan / sasaran			
						Kebijakan	Program	Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dinas Pendidikan	Menjadi pusat pelayanan dan penggerak dalam membentuk manusia yang beriman, bertaqwa, berbudi luhur, terampil, tangguh, mandiri, inovatif dan demokrasi menuju masyarakat sejahtera.	<p>1. Meningkatkan keimanan, ketaqwaan, budi pekerti luhur dalam kehidupan sehari-hari</p> <p>2. Meningkatkan Kinerja pengelolaan pendidikan demi terwujudnya pelayanan prima.</p> <p>3. Menyempurnakan manajemen Pendidikan agar efektif dan efisien sesuai dengan tuntutan zaman.</p> <p>4. Menuntaskan wajib belajar 9 tahun dan pemberantasan buta aksara serta baca tulis Al-Qur'an</p> <p>5. Meningkatkan</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman.</p> <p>2. Meningkatkan apresiasi olahragaa dan seni bagi pelajar</p>	<p>1. Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan.</p> <p>2. Meningkatkan Keterjangkauan Layanan Pendidikan.</p> <p>3. Meningkatkan Kualitas / Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan</p> <p>4. Meningkatkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan</p> <p>5. Meningkatkan Kepastian / Keterjaminan Memperoleh Layanan Pendidikan</p>	<p>7. Tersedia Layanan PAUD Berkualitas, Tersedia Layanan Pendidikan Dasar Berkualitas, Tersedia Layanan Pendidikan Menengah yang Berkualitas dan Relevan, Tersedia Layanan Pendidikan Tinggi Berkualitas, Relevan, dan Berdaya Saing Internasional, Tersedia Layanan Pendidikan Orang Dewasa Berkelanjutan, Tersedianya Sistem Tata Kelola yang Handal.</p> <p>8. Terjangkaunya Layanan PAUD Berkualitas, Terjangkaunya, dan Terjaminnya Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan Dasar Berkualitas, Terjangkaunya Layanan Pendidikan Menengah yang Berkualitas dan Relevan, Terjangkaunya Layanan Pendidikan Tinggi Berkualitas, Relevan, dan Berdaya Saing Internasional,</p>	<p><i>Program Pelayanan administrasi perkantoran</i></p> <p><i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i></p>	<p>1. Penyediaan jasa surat menyurat</p> <p>2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</p> <p>3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</p> <p>4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas</p> <p>5. Penyediaan jasa kebersihan kantor</p> <p>6. Penyediaan alat tulis kantor</p> <p>7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</p> <p>8. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor</p> <p>9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</p> <p>10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</p> <p>11. Penyediaan makanan minuman</p> <p>12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</p> <p>13. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan</p> <p>1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</p> <p>2. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan</p> <p>3. Pemeliharaan rutin/berkala mobil operasional</p> <p>4. Belanja perawatan kendaraan</p>	<p>34,384,000</p> <p>474,438,000</p> <p>188,100,000</p> <p>4,000,000</p> <p>24,000,000</p> <p>784,110,000</p> <p>129,000,000</p> <p>43,500,000</p> <p>56,050,000</p> <p>3,000,000</p> <p>18,500,000</p> <p>50,000,000</p> <p>2,029,633,000</p> <p>283,500,000</p> <p>18,000,000</p> <p>30,000,000</p> <p>10,110,000</p>

Lampiran 4. Matrik Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2010 (lanjutan)

		peran serta masyarakat termasuk perantau dalam penyelenggaraan pendidikan.		Terjangkaunya Layanan Pendidikan Orang Dewasa Berkelanjutan		5. Perawatan rutin/berkala Meubelair bermotor	30,000,000
3		6. Meningkatkan Kerjasama unsur dalam pengelolaan Pendidikan		9. Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan PAUD Berkualitas, Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan Dasar Berkualitas, Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan Menengah yang Berkualitas dan Relevan, Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan Tinggi Berkualitas, Relevan, dan Berdaya Saing	<i>Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4. Forum SKPD Bidang Pendidikan	5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
4		7. Menyelenggarakan Pendidikan persekolah dan luar sekolah yang profesional, mandiri, kreatif, berwawasan global dan berjiwa kewirausahaan.		9. Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan Tinggi Berkualitas, Relevan, dan Berdaya Saing Internasional, Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan Orang Dewasa Berkelanjutan	<i>Program Pendidikan Anak Usia Dini</i>	1. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 2. Perawatan rutin/berkala bangunan sekolah 3. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 4. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	10,000,000 365,500,000 1,846,600,000 420,200,000
5		8. Mewujudkan masyarakat yang berprestasi dalam olahraga, seni dan budaya.		10. Meningkatkan kesetaraan Layanan PAUD, Meningkatkan kesetaraan Meperoleh Layanan Pendidikan Dasar Berkualitas, Meningkatkan kesetaraan Layanan Pendidikan Menengah yang Berkualitas dan Relevan, Meningkatkan kesetaraan Layanan Pendidikan Tinggi Berkualitas, Relevan, dan Berdaya Saing Internasional, Meningkatkan kesetaraan Layanan Pendidikan Orang Dewasa Berkelanjutan	<i>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun</i>	1. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa. 2. Perawatan rutin/berkala bangunan sekolah. 3. Perawatan rutin/berkala bangunan sekolah 4. Perawatan rutin/berkala bangunan sekolah 5. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah. 6. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 7. Pembinaan SMP Terbuka. 8. Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam setara SD dan SMP.	300,000,000 1,045,000,000 795,899,950 249,100,050 2,470,250,000 2,470,250,000 10,000,000 25,000,000
		9. Mewujudkan masyarakat yang gemar membaca, mencintai ilmu pengetahuan dan membudayakan pola pikir ilmiah serta peduli terhadap lingkungan.		11. Meningkatkan			

Lampiran 4. Matrik Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2010 (lanjutan)

							3. Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Sekolah.	152,250,000
							4. Penyelenggaraan Paket C setara SMA.	125,000,000
							5. Pengembangan Bahasa Mandarin.	30,000,000
							6. Penyelenggaraan Olimpiade Sains SMA/SMK.	26,000,000
							7. Pengadaan Buku Induk, Raport Leger untuk SMA/SMK.	40,000,000
							8. Penyelenggaraan Ujian SMA/SMK/MA.	150,000,000
							9. Penyelenggaraan Lomba Siswa Berprestasi Tingkat SMA/SMK.	20,000,000
							10. Fasilitasi Penyediaan Bea Siswa Bagi Keluarga Tidak Mampu.	20,000,000
							11. Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun.	20,000,000
							12. Penyelenggaraan Sekolah Berbasis Internasional (SBI) Tingkat SMA	300,000,000
7					<i>Program Pendidikan Non Formal</i>		1. Pelatihan Tutor Keaksaraan Fungsional Lanjutan (KF).	20,000,000
							2. Penyelenggaraan Program Keaksaraan Fungsional	50,000,000
8					<i>Program Pendidikan Luar Sekolah</i>		1. Penyediaan makanan dan minuman harian	65,000,000
9					<i>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</i>		1. Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik.	30,000,000
							2. Penilaian guru berprestasi TK/SD.	15,000,000
							3. Penilaian pengawas TK/SD berprestasi.	10,000,000
							4. Penilaian Kepala TK/SD Berprestasi.	10,000,000
							5. Entry dan Update data Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) SD, MI, SMP/MTs, SMA, SMK dan MA Negeri/ Swasta	20,890,000
10					<i>Program Pengembang</i>		1. Pengembangan minat dan budaya baca.	10,000,000

Lampiran 4. Matrik Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2010 (lanjutan)

						an Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	2. Sosialisasi Minat Baca Masyarakat melalui kegiatan Hari Aksara Internasional (HAI).	15,000,000
11						Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1. Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan. 2. Penyelenggaraan Pameran Pendidikan. 3. Peringatan Hardiknas	30,000,000 40,000,000 30,000,000
12						Program Pendidikan Perguruan Tinggi	1. Penyediaan Bea siswa bagi keluarga tidak mampu	10,000,000
13						Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	1. Pembinaan Olahraga Usia Dini. 2. Olimpiade Olahraga SD. 3. Olimpiade Olahraga SDLB/PLD. 4. Olimpiade Olahraga SMP. 5. Pengirim Kontingen POR SD Ketingkat Provinsi. 6. Menyelenggarakan POPDA IV Tingkat Kabupaten. 7. Menyelenggarakan Kejuaraan Sepak Takraw	15,000,000 15,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 45,000,000 10,000,000